

- **Inklusi Keuangan: Solusi Pengentasan Kemiskinan**
Muhammad H. Holle
- **Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap *Economic Value Added* pada Perusahaan Bursa Efek Indonesia Melalui Pendekatan *Struktural Equation Model-Partial Least Square***
Yusrianti Hanike, Damirah
- **Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi, Pespektif Ekonom Syariah**
Julianti LB. Mossy, Abdul Latif L. Arsyad
- **Implementasi Program Koperasi Unit Desa (KUD) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Hila kecamatan Leihitu Maluku Tengah**
Muhammad Idul Launuru
- **Pengukuran Kualitas Layanan Akademik Menggunakan *Model Student Satisfaction Inventory***
Diar Muzna Tangke

Amal

Jurnal ekonomi Syariah

Vol. 1 No. 2, Desember 2019

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Amal

JURNAL EKONOMI SYARIAH

Vol. 1 No. 2, Desember 2019

TABLE OF CONTENTS

Articles:

	PAGE
Inklusi Keuangan: Solusi Pengentasan Kemiskinan Muhammad H. Holle	163-176
Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap <i>Economic Value Added</i> Pada Perusahaan Bursa Efek Indonesia Melalui Pendekatan <i>Struktural Equation Model-Partial Least Square</i> Yusrianti Hanike, Damirah	177-191
Implementasi Program Koperasi Unit Desa (KUD) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Hila Kecamatan Leihitu Maluku Tengah Muhammad Idul Launuru	192-205
Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi, Perspektif Ekonom Syariah Julianti LB. Mossy, Abdul Latif L. Arsyad	206-230
Pengukuran Kualitas Layanan Akademik Menggunakan <i>Model Student Satisfaction Inventory</i> Diar Muzna Tangke	231-242

REDAKSI

Amal

JURNAL EKONOMI SYARIAH

Vol. 1 No. 2, Desember 2019

PIMPINAN REDAKSI / EDITOR IN CHIEF

Muhammad H. Holle, M.Si

EDITORIAL TEAM

Mar'atun Shalihah, M.Si

Dra. Aisa Manilet

Arizal Hamizar, M.Si

SECTION EDITOR

Dety Aryani Relubun, M.Si

Muammar W. Maruapey, M.Si

Salma Saimima, MM

Fitria Karnudu, MM

Nahriah Latuconsina, M.Esy

REVIEWERS

Dr. Sirajul Arifin, M.Ei

Dr. Ismail Tuanany, MM

Dr. Maimuna Toatubun, M.Si

Dr. Jailani Lamasidonda

Fadlan, MA

DESAIN GRAFIS

Arizal hamizar, M.Si

ALAMAT REDAKSI/PENERBIT

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Jl. Dr. H. Tarmidzi Tahir Kebun Cengkeh Batu Merah Atas

Ambon – Maluku (97128)

Telp. (0911) 344816, Fax. (0911) 344315

E-mail: jurnalamal@gmail.com

INKLUSI KEUANGAN; SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN GUNA DAYA SAING PEREKONOMIAN BANGSA

Mohammad H. Holle¹

ABSTRACT

This article aims to examine in a second the concept of financial inclusion in relation to poverty alleviation solutions for the competitiveness of the nation's economy. Indonesian financial inclusion by the results of the 2016 National Financial Inclusion Survey tend to have a high financial inclusion index. DKI Jakarta is the best because it has a high financial literacy index of 40.0% and a financial inclusion index of 78.2%. In contrast, West Papua Province has a relatively low financial inclusion index. Although the inclusion index is quite high, the number of provinces above the average is not much. That means there is still a need for concerted efforts to encourage all provinces in Indonesia to have a high financial inclusion index.

The solution to overcome poverty and the competitiveness of the nation's economy is to position the banking sector to increase lending, especially productive investment loans by upholding the principles of risk management. Need to promote financial awareness, especially for low income families. This can help them avoid debt, increase their economic activities, increase family income and escape poverty. The application of financial inclusion can be applied through social payments for the poor, credit extension schemes that are compatible with micro and small businesses accompanied by guarantees of banking funds, and digital financial services. Overall, financial inclusion is one of the strategies in achieving inclusive growth which will ultimately reduce inequality in society and reduce poverty.

Keyword: financial inclusion, poverty, competitiveness

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mengkaji secara detik konsep inklusi keuangan dalam kaitannya dengan solusi pengentasan kemiskinan guna daya saing perekonomian bangsa. Inklusi keuangan Indonesia oleh data hasil Survei Nasional Inklusi Keuangan tahun 2016 cenderung memiliki indeks inklusi keuangan yang tinggi. Provinsi DKI Jakarta adalah yang terbaik karena memiliki indeks literasi keuangan yang tinggi yaitu 40,0% dan indeks inklusi keuangan 78,2%. Sebaliknya, Provinsi Papua Barat memiliki indeks inklusi keuangan yang relatif rendah. Walaupun indeks inklusi cukup tinggi, namun jumlah provinsi yang di atas rata-rata tidaklah banyak. Itu artinya masih diperlukan upaya bersama untuk mendorong agar semua provinsi di Indonesia memiliki indeks inklusi keuangan yang tinggi.

Solusi untuk mengatasi kemiskinan dan daya saing ekonomi bangsa, memposisikan sektor perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit, terutama kredit investasi yang produktif dengan memegang teguh prinsip manajemen resiko. Perlu mempromosikan kesadaran keuangan, khususnya untuk keluarga berpenghasilan rendah. Hal ini dapat membantu mereka menghindari utang, meningkatkan kegiatan ekonomi mereka, meningkatkan pendapatan keluarga dan melepaskan diri dari kemiskinan. Penerapan inklusi keuangan dapat diterapkan melalui pembayaran sosial kelompok miskin, pemberian kredit dengan skema yang compatible dengan usaha mikro dan kecil disertai dengan penjaminan dana perbankan, serta layanan keuangan digital. Secara keseluruhan, inklusi keuangan merupakan salah satu strategi dalam pencapaian pertumbuhan inklusif yang pada akhirnya akan mereduksi ketimpangan yang ada di masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Keyword: Inklusi keuangan, kemiskinan, daya saing

¹ Mohammad H. Holle, Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan (UINSA) Ampel Surabaya dan Dosen tetap Prodi Ekonomi Syariah IAIN Ambon

A. Latar Belakang

Daya saing ekonomi perdesaan dapat berkembang melalui strategi pertumbuhan ekonomi inklusif. Walau sering dipertukarkan istilah dengan pertumbuhan tersebut (*broad based economic growth*) atau pertumbuhan yang pro-kemiskinan (*pro poor economic growth*)², pertumbuhan inklusif mempunyai makna dan implikasi yang lebih luas dari keduanya. Pertumbuhan inklusif merupakan pendekatan pertumbuhan yang berbasis pada kekuatan sumber-sumber pertumbuhan yang ada dan tersebut, baik antara sektor maupun wilayah, termasuk pendekatan padat karya, dan sekaligus pendekatan pertumbuhan yang berfokus pada *outcome*, yakni penurunan kemiskinan, khususnya kemiskinan absolute, pertumbuhan inklusif juga akan menurunkan disparitas, mendorong tumbuhnya kapasitas ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing kelompok miskin.

Ali dan Zhuang mendefinisikan pertumbuhan inklusif sebagai pertumbuhan yang berbasis pada upaya mendorong tercapainya kesamaan kesempatan, dan perluasan akses ke pasar dan sumberdaya, sehingga setiap individu dapat berkontribusi secara aktif dan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Definisi ini tidak berbeda jauh dari definisi Bank Dunia dalam laporannya tahun 2006. Ada dua hal yang selalu dirujuk berkaitan dengan pertumbuhan inklusif, yakni tahapan dan pola pertumbuhan serta *outcome* berupa penurunan kemiskinan.³

Penurunan kemiskinan saja tidaklah cukup karena pertumbuhan tersebut juga harus berkualitas dan terwujud dalam bentuk kenaikan produktivitas kelompok yang tidak beruntung, menurunnya disparitas pendapat dan asset, meningkatnya akses dan juga proteksi pasar dan sumberdaya, dan kebijakan yang tidak diskriminatif. Bukan hanya itu, pertumbuhan inklusif juga harus memberikan manfaat bukan hanya kepada mereka yang miskin, melainkan juga kepada yang hampir miskin, kelompok kelas menengah, bahkan yang kaya sekalipun.

Hasil Survei Nasional OJK menunjukkan bahwa sekitar 52 persen penduduk Indonesia hidup di daerah perdesaan dan sekitar 60 persennya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Dari sekitar 12,49 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 64 persen tinggal di daerah perdesaan. Angka-angka ini, ditambah dengan kondisi sebaran geografis dari kepulauan Indonesia, menunjukkan pentingnya bagi strategi nasional keuangan inklusif untuk

² Pertumbuhan pro-kemiskinan adalah ketika pendapatan orang miskin meningkat. Pendapat lain menganggap bahwa pertumbuhan yang dapat meningkatkan pendapatan miskin secara proporsional lebih dari peningkatan pendapatan rata-rata dalam masyarakat (Lihat : Kakwani et al. Dalam Maria Piotrowska, *The Direct and Indirect Effects of The Pro-Poor Growth*, 2004), h. 252, dan Ravallion, *A Poverty-Inequality Trade-off? World Bank Policy Research; Working Paper 3579*, April 2005). Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 18, Nomor 3, Januari 2016.

³ Ali dan Zhuang, *Defining and Measuring Inclusive Growth: Application to the Philippines*, (Asian Development Bank, 2007), h. 1.

memberi perhatian khusus kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa keuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (misalnya, mobile money untuk memfasilitasi transfer dan transaksi pembayaran antar pulau, serta antar perdesaan dan perkotaan).

Begitupun hasil survey OJK tentang indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan indeks literasinya. Indeks inklusi keuangan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 59,7% masyarakat Indonesia telah mengakses lembaga jasa keuangan formal. Sementara itu, indeks inklusi keuangan Indonesia tahun 2016 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 8.1%.⁴

Demikian halnya dengan indeks inklusi keuangan untuk perbankan yang masih mendominasi dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan lainnya. Sementara itu, indeks inklusi keuangan juga belum merata di setiap provinsi.

Dalam survei yang dilakukan OJK pada tahun 2016 diketahui bahwa sebanyak 42,5% masyarakat pernah mengalami kondisi dimana penghasilan yang dimiliki tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam satu tahun terakhir. Dari kondisi tersebut, 26,5% masyarakat melakukan berbagai upaya untuk menghadapi kondisi dimaksud, antara lain menarik tabungan (33,6%) dan meminjam dari keluarga atau teman (20,9%). Sementara upaya yang dilakukan dan berhubungan dengan lembaga jasa keuangan masih terbilang rendah yaitu pinjaman di lembaga jasa keuangan formal (5,5%) dan pinjaman dengan gadai (3,8%).

Kondisi inklusi keuangan di Indonesia dapat dikatakan masih rendah atau dapat dikategorikan dalam eksklusi keuangan. Posisi indeks keuangan inklusif Indonesia yang hanya 36% pada tahun 2014 cukup tertinggal dibandingkan beberapa negara di ASEAN, seperti Thailand 78%, Malaysia 81%, meski lebih besar dari Filipina dan Vietnam yang masing-masing 31%.⁵

Sementara tahun 2019, Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 2016, dimana indeks inklusi keuangan 67,8%. Dengan demikian dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39%. Sinergi dan kerja keras tersebut target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75% pada tahun 2019 telah tercapai. Survei OJK 2019 ini mencakup 12.773 responden di 34 provinsi dan 67 kota/kabupaten dengan mempertimbangkan

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*, (OJK: Jakarta, 2017), h. 21

⁵ *Bulletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 20 nomor 1 Juli 2017.

gender dan strata wilayah perkotaan/perdesaan. Sebagaimana tahun 2016, SNLIK 2019 tetap menggunakan metode, parameter dan indikator indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (*usage*). Berdasarkan strata wilayah, untuk perkotaan inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 83,60%, sementara indeks inklusi keuangan masyarakat pedesaan adalah 34,53% dan 68,49%. Hasil survei juga menunjukkan bahwa berdasarkan *gender* indeks inklusi keuangan laki-laki sebesar 39,94% dan 77,24%, relatif lebih tinggi dibanding perempuan sebesar 36,13% dan 75,15%. OJK menggunakan hasil survei literasi keuangan 2019 ini untuk penyempurnaan strategi pengembangan inklusi keuangan nasional yang lebih efektif dan tepat sasaran.⁶

Terlepas dari meningkatnya angka inklusi keuangan Indonesia, masih terdapat perbedaan yang sangat besar dalam hal jumlah masyarakat miskin di daerah perkotaan dan pedesaan, di mana kemiskinan ekstrim pada daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pelosok. Di sisi lain, kesenjangan pencapaian pembangunan antar provinsi juga semakin besar. Kemiskinan di kawasan timur Indonesia menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan barat Indonesia. Lima daerah tertinggi menurut tingkat kemiskinan adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo. Sebagai akibatnya, koefisien Gini pendapatan semakin meningkat sejak tahun 1990an.⁷

Hal ini, kata Demirguc-Kunt et al., menuntut upaya pemerintah guna menyusun konsep kongkrit yang berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi dan memungkinkan seluruh segmen masyarakat menikmati manfaatnya. Untuk itu, inklusifitas pertumbuhan ekonomi merupakan kebijakan populis guna menurunkan angka kemiskinan. Jika tidak berusaha melenyapkan “*financial barriers*” pada produk dan layanan jasa keuangan, akan memunculkan adagium bahwa masyarakat miskin akan tetap menjadi miskin. Sederhananya, konsep sistem keuangan yang inklusif tidak hanya muncul sebagai program yang *pro-growth*, namun juga *pro-jobs* untuk masyarakat miskin (*pro-poor*).⁸

Inklusi keuangan menjadikan masyarakat miskin menjadi kelompok sasaran. Hal ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Strategi yang berpusat pada masyarakat ini perlu menysasar kelompok yang mengalami hambatan untuk

⁶ Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers Survei OJK 2019: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Meningkat*, SP 58/DHMS/OJK/XI/2019.

⁷ I Made Sanjaya, Nursechafia, “*Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia*, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*”, Volume 18, Nomor 3, Januari 2016, h. 282

⁸ Demirguc-Kunt, A., T. Beck, P. Honohan. “*Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access*”. Washington D.C.: A World Bank Policy Research Report, 2008), h. 282.

mengakses layanan keuangan. Strategi keuangan inklusif secara eksplisit menysasar kelompok dengan kebutuhan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan keuangan yaitu tiga kategori penduduk (orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja/miskin produktif, dan orang hampir miskin) dan tiga lintas kategori (pekerja migran, perempuan, dan penduduk daerah tertinggal).

Masyarakat miskin sepenuhnya belum bersentuhan dengan lembaga formal keuangan. Hal ini dapat dilihat dari tiga dimensi, yakni aksesibilitas, ketersediaan dan penggunaan. Akses masyarakat miskin untuk mendapatkan financial service dari lembaga keuangan cenderung masih kecil. Hal ini tidak lepas dari pengaruh ketersediaan jumlah service financial formal. Bukan hanya jumlahnya, tapi akses jangkauan lembaga formal keuangan juga belum maksimal. Begitupun masyarakat miskin sendiri belum maksimal menggunakan layanan lembaga keuangan formal.

Inklusi keuangan menunjukkan bahwa individu dan rumah tangga yang kurang beruntung dan area yang dirampas lebih mungkin dipengaruhi oleh pengecualian dari sistem keuangan, hal ini juga terkait dengan biaya ekonomi dan sosial bagi mereka yang terkena dampak.

B. Makna Inklusi Keuangan

Menurut Gloukoviezoff, produk keuangan memainkan peranan penting dalam masyarakat saat ini. Mampu mengakses dan menggunakan berbagai macam produk dan layanan keuangan sekarang diperlukan 'untuk menjalani kehidupan sosial yang normal.'⁹

Konsep inklusi keuangan, kemudian mengacu pada ketidakmampuan individu untuk mengakses dan / atau secara efektif menggunakan produk keuangan yang membantu mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang merupakan kehidupan sosial.

Inklusi keuangan juga didefinisikan oleh Ogunsakin et.all, sebagai salah satu alat kebijakan yang efektif yang digunakan oleh pemerintah negara-negara maju dalam memerangi dan mengurangi tingkat kemiskinan mengingat kemampuannya untuk memfasilitasi alokasi sumber daya produktif yang efisien, yang mengurangi biaya modal.¹⁰

Dalam strategi nasional keuangan inklusif, inklusi keuangan didefinisikan sebagai: Hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian

⁹ Gloukoviezoff dalam Nicole Lederle, *Exploring the Impacts of Improved Financial Inclusion on the Lives of Disadvantaged People*, (Heriot-Watt University School of the Built Environment, 2009), h. 1.

¹⁰ Ogunsakin, Sanya, Fawehinmi Festus Olumide, *Financial Inclusion as an Effective Policy Tool of Poverty Alleviation: A Case of Ekiti State*, IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF) e-ISSN: 2321-5933, p-ISSN: 2321-5925. Volume 8, Issue 4 Ver. II, (Jul.– Aug.2017), h. 01-10

khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil.¹¹

Josua Pardede mengatakan inklusi keuangan adalah peningkatan penyediaan jasa keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan pada seluruh lapisan masyarakat, yang diikuti dengan meningkatnya volume pasar.¹² Menurutnya volume pasar keuangan yang dihasilkan dari kemajuan sektor keuangan ini diharapkan dapat menyerap volatilitas dari setiap pelaku pasar.

Claessens, mendefinisikan inklusi keuangan sebagai ketersediaan pasokan layanan keuangan berkualitas yang wajar dengan biaya yang wajar, di mana kualitas yang wajar dan biaya yang masuk akal harus ditentukan relatif terhadap beberapa standar obyektif, dengan biaya yang mencerminkan semua biaya keuangan dan non-keuangan. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa akses ke layanan keuangan datang dengan beberapa kemiripan manfaat (tabungan, kredit, bunga kredit, dll) dan biaya dalam bentuk biaya bank dan komisi.¹³

Rangarajan Committee di India mendefinisikan inklusi keuangan, sebagai proses memastikan akses kelayakan keuangan dan kredit memadai tepat waktu di mana diperlukan oleh kelompok rentan atau yang lebih lemah dan kelompok berpenghasilan rendah namun dengan harga yang terjangkau.¹⁴

Sementara Bank dunia mengartikan inklusi keuangan bahwa individu dan bisnis memiliki akses ke produk dan layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau yang memenuhi kebutuhan mereka – transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi – disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.¹⁵

Dari definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa unsur yang berperan dalam inklusi keuangan adalah akses, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan, serta kualitas.

Sementara menurut beberapa pakar ekonomi, teori dasar inklusi keuangan adalah perkembangan sektor keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui jalur *supply – leading* maupun *demand – following*.

¹¹ Bank Indonesia. *Booklet Keuangan Inklusif*. (Jakarta: Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, 2014), h. 1

¹² *Ibid*

¹³ Claessens (2006) dalam, Mohammed Ibrahim Jabir, *Financial Inclusion And Poverty Reduction In Subsaharan Africa*, (College Of Humanities University Of Ghana, 2015), 15

¹⁴ Rangarajan Committee, (2008), *Ibid*

¹⁵ Bank Dunia. <http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion>. Tanggal terbit, 27 Mei 2018

C. Bagaimana Mengukur Pertumbuhan Inklusif ?

Mengukur pertumbuhan inklusif tidak cukup hanya mencakup dimensi pendapatan, tetapi juga dimensi non-pendapatan. Bank Pembangunan Asia mengusulkan beberapa indikator untuk mengukur pertumbuhan inklusif: (i) Penurunan tingkat kemiskinan absolut pada kelompok miskin (dengan standar pendapatan 2,5 dollar AS per hari); (ii) Peningkatan lapangan kerja pada kelompok miskin dan tidak beruntung; (iii) Penurunan disparitas baik pendapatan maupun non-pendapatan antara kelompok, golongan, etnis, serta kelompok minoritas; (iv) Peningkatan kapasitas kelompok yang mencakup aspek pendidikan dan kesehatan yang lebih baik sehingga mereka dapat berpartisipasi dan akan mendapat manfaat dari pertumbuhan; dan (v) Integrasi sosial yang lebih baik.¹⁶

Pengukuran pertumbuhan inklusif ini selaras dengan evolusi konsep pembangunan yang menekankan semakin pentingnya sumber pertumbuhan ekonomi nonfisik dan modal sosial,¹⁷ dan evolusi konsep kemiskinan yang menekankan pentingnya mitigasi kemiskinan dari dimensi nonfisik karena lemahnya akses ke sumber daya pendidikan, kesehatan, hak-hak politik, dan lemahnya kelembagaan.¹⁸

Kebijakan keuangan inklusif menurut Onaolupo yang efektif berdampak pada ekonomi karena berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, pertumbuhan yang pro-masyarakat miskin dan pertumbuhan ekonomi yang dipercepat, dalam studi Levine, menyimpulkan bahwa infrastruktur kelembagaan dari sistem keuangan berkontribusi untuk mengurangi asimetri informasi keuangan, kontraksi dalam transaksi, biaya, yang pada gilirannya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi.¹⁹

D. Daya Saing Ekonomi dan Kemiskinan

Penilaian indeks daya saing Indonesia lebih banyak tertolong oleh faktor inovasi dengan menempati peringkat 30 dari 144 negara, sementara faktor kebutuhan primer dan faktor efisiensi menempati peringkat 46 dari 144 negara. Dalam hal kemampuan berinovasi, Indonesia menempati peringkat 22 dari 144 negara dengan nilai 4.8 (skala 1-7), nilai ini di atas negara maju lain seperti Kanada (26), Australia (27), dan Italia (39). Meskipun demikian hal ini tidak serta-merta

¹⁶ Stephan Klasen, *Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals*, (Asian Development Bank, 2010), h. 12

¹⁷ Gerald M. Meler, *Frontiers of Development economics The Future In Perspective*, (Oxford is a registered trademark of Oxford University Press, 2001), h. 4

¹⁸ Ravi Kanbur dan Lyn Squire, 2010, dalam Stephan Klasen, *Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals*, (Asian Development Bank, 2010), h. 5

¹⁹ Onaolupo, Levine, dalam Ogunsakin, Sanya, Fawehinmi Festus Olumide, *Financial Inclusion as an Effective Policy Tool of Poverty Alleviation: A Case of Ekiti State*, IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), Volume 8, Issue 4 Ver. II, (Jul.– Aug, 2017), h. 3.

mendorong daya saing Indonesia ke level maksimal mengingat daya saing harus melibatkan seluruh aspek. Indonesia memiliki keunggulan dalam kemampuan berinovasi akan tetapi setiap warganya belum memiliki akses dan kesempatan yang sama, serta masih terdapat banyaknya hambatan yang menghalangi inovasi pada level yang maksimal.²⁰

Berdasarkan sensus ekonomi tahun lalu, BPS mendapati sebanyak 26,71 juta usaha tersebar di Indonesia. Itu didasarkan pada hasil sensus ekonomi 2016. Jumlah tersebut naik 17,51 ketimbang perolehan sensus ekonomi 2006, sebesar 22,73 juta usaha. Sekitar 15 kelompok usaha dalam sensus ekonomi 2016. Terbesar adalah kelompok perdagangan besar dan eceran. Jumlahnya mencapai 12,3 juta atau 46,17 persen dari total usaha di Tanah Air. Lantaran terbesar, wajar jika kelompok usaha perdagangan besar dan eceran menyerap tenaga kerja paling tinggi. Jumlahnya mencapai 22,4 juta pekerja atau 31,81 persen dari total pekerja di Indonesia. Di peringkat selanjutnya, bertengger kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan air minum yang menguasai sebesar 16,72 persen dari total 26,71 juta usaha di Tanah Air. Disusul Industri pengolahan 16,53 persen.²¹

Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyelesaikan Sensus Ekonomi 2016. Dari sensus tersebut, ditemukan ada peningkatan usaha sebesar 17,51 persen menjadi 26,71 juta usaha atau perusahaan di Indonesia. Dari laporan BPS, mencatat sebaran usaha atau perusahaan antar pulau, 79,35 persen usaha atau perusahaan terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (Pulau Sumatra dan Jawa). Sebanyak 16,2 juta usaha/perusahaan atau 60,74% terhadap seluruh usaha / perusahaan di Indonesia berada di pulau Jawa. Sementara, bila dibedakan menurut skala usaha, 26,26 juta usaha/perusahaan atau 98,33% berskala Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 0,45 juta /perusahaan atau 1,67% berskala Usaha Menengah Besar (UMB). Adapun dari sisi jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha, didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 22,37 juta tenaga kerja atau 31,81% dari tenaga kerja yang ada di Indonesia.²²

Salah satu sebab tingginya tingkat kemiskinan, termasuk di Indonesia, adalah terbatasnya akses penduduk miskin dan UMK kepada sumber daya, baik sumber daya pendidikan, kesehatan, dan khususnya sumber daya keuangan.

Rendahnya akses kepada lembaga keuangan ini juga terkonfirmasi oleh tingkat inklusi keuangan yang relatif rendah. Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indeks Inklusi Keuangan (FII) Indonesia baru sekitar 20 persen, terendah di ASEAN dan hanya sedikit di atas Kamboja, Myanmar, dan Laos. Melalui peningkatan inklusi keuangan ini, industri perbankan

²⁰ <https://syafaatmuhamari.wordpress.com/2017/02/17/mendorong-inovasi-meningkatkan-daya-saing-global-1/>

²¹ Badan Pusat Statistik, 2017

²² *ibid*

dapat berperan ikut memberantas kemiskinan²³. Sebagaimana yang dilakukan India, pemerintah Indonesia seharusnya mampu melakukan terobosan untuk mendorong tumbuhnya ekonomi pedesaan yang inklusi, melalui pengembangan UMK.

Bank Sentral India menempuhnya melalui strategi keuangan inklusi, yang esensinya adalah *poor is bankable*, masalah yang dihadapi di perbankan India tidak jauh berbeda dengan Indonesia, masalah UMK berkisar pada lemahnya akses dan informasi pasar karena jaringan dan informasi pasar biasanya dikuasai pasar tengkulak atau pengepul, lemahnya akses ke lembaga keuangan karena tiadanya jaminan dan terutama UMK tidak punya kebiasaan membuat laporan keuangan yang sederhana sekalipun yang memang diperlukan oleh perbankan untuk melakukan penilaian kelayakan, kualitas produk yang rendah dan tidak standar, kurangnya pengembangan produk karena lemahnya penguasaan teknologi atau tiadanya informasi pasar mengenai produk.

E. Strategi Inklusi Keuangan Guna Daya Saing Perekonomian Bangsa

Inklusi keuangan memiliki sasaran yang sudah ditetapkan. Dari sasaran ini pula, disusun strategi untuk mencapai tujuan dilaksanakannya inklusi keuangan. Adapun sasaran²⁴ dari inklusi keuangan adalah sebagai berikut :

- Masyarakat miskin berpendapatan terendah.

Kategori ini mencakup mereka yang memiliki akses sangat terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan. Kategori ini mengacu pada golongan sangat miskin yang mungkin menerima bantuan sosial, serta segmen bawah kategori miskin yang menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat.

- Miskin Bekerja.

Kategori ini mencakup orang miskin yang berusaha sendiri, termasuk di dalamnya petani kecil dan marjinal, nelayan, seniman dan perajin, pedagang kecil, dan pengusaha mikro di sektor informal baik di perkotaan dan pedesaan. Kurangnya sumber daya membatasi kemampuan mereka untuk memperluas produksi atau melakukan perbaikan dalam hal produktivitas dan pendapatan.

- Bukan Miskin.

Kategori ini meliputi semua penduduk yang tidak memenuhi kriteria untuk masuk dalam kelompok masyarakat miskin berpendapatan terendah dan miskin bekerja. 1 Kategori ini, walaupun fokus pada kelompok hampir miskin (*near-poor*), juga mencakup mereka yang bukan

²³ Otoritas Jasa Keuangan, 2017.

²⁴ Departemen Pengembangan akses Keuangan dan UMKM, *Boklet Keuangan Inklusif*. (Bank Indonesia, 2014), h. 9-10

miskin (termasuk kelas menengah dan masyarakat yang mampu secara ekonomi). Strategi keuangan inklusif mencakup semua orang yang berada di luar sistem keuangan, termasuk mereka yang bukan miskin (non-poor), yang meski pun memiliki peluang akses lebih besar, karena berbagai alasan belum masuk sistem keuangan.

- Pekerja Migran Domestik dan Internasional.

Indonesia merupakan negara penerima remitansi ketiga terbesar di wilayah Asia-Pasifik. Sekitar 80 persen pekerja migran atau lazim di sebut TKI (Tenaga Kerja Indonesia) adalah perempuan dan lebih dari 85 persen bekerja di sektor informal. TKI biasanya kurang terlayani oleh sektor keuangan, atau memiliki akses yang terbatas ke layanan keuangan. Mereka terutama membutuhkan sarana untuk mengirim uang secara aman, cepat, dan murah dari tempat kerja ke rumah, yang sering kali terletak di daerah terpencil dan tertinggal. TKI umumnya berasal dari rumah tangga pertanian yang miskin, yang terletak di daerah perdesaan dengan tingkat pendapatan rendah. Mereka memiliki akses yang terbatas ke produk atau jasa keuangan formal untuk mendukung mereka selama proses tahapan migrasi (yaitu, pra, selama, dan pasca migrasi).

- Perempuan.

Di banyak negara berkembang, kerap terdapat perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kebutuhan, dan pilihan mereka terhadap jasa keuangan; sehingga dalam mengembangkan akses terhadap layanan keuangan, adalah penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Di Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mempunyai rekening tabungan. Namun, motivasi utama laki-laki saat membuka rekening tabungan bank lebih sering adalah untuk memperoleh kredit, sedangkan perempuan menabung demi keperluan mendatang. Dalam hal kepemilikan asuransi, perempuan lebih sering membeli asuransi pendidikan, sementara laki-laki lebih memilih asuransi jiwa, dan pada taraf tertentu juga memiliki asuransi harta benda.

- Penduduk daerah terpencil.

Sekitar 52 persen penduduk Indonesia hidup di daerah perdesaan dan sekitar 60 persennya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Dari sekitar 12,49 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 64 persen tinggal di daerah perdesaan. Angka-angka ini, ditambah dengan kondisi sebaran geografis dari kepulauan Indonesia, menunjukkan pentingnya bagi strategi nasional keuangan inklusif untuk memberi perhatian khusus kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa keuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (misalnya, mobile money untuk memfasilitasi transfer dan transaksi pembayaran antar pulau, serta antar perdesaan dan perkotaan).

Dari sasaran yang sudah disebutkan, pemerintah mempunyai peran strategis untuk mendorong tumbuhnya daya saing ekonomi pedesaan yang inklusif. Sesungguhnya, ekonomi pedesaan mampu tumbuh dari kekuatan dirinya sendiri. Yang diperlukan adalah pemerintah berperan sebagai katalisator dan akselator dengan mengatasi berbagai kelemahan tersebut. Pemerintah seharusnya fokus pada aspek berikut.

Pertama, penyediaan infrastruktur pedesaan yang layak, seperti jaringan irigasi, jalan-jalan desa, pasar desa. *Kedua*, mendorong peningkatan akses ke sektor keuangan melalui program penjaminan, mendorong perbankan untuk juga menerapkan jaminan sosial seperti jaminan tanggung renteng, program pengembangan manajemen sederhana dengan melibatkan lembaga keuangan. *Ketiga*, meningkatkan akses pasar melalui penyediaan informasi pasar. Pengembangan produk, pengembangan jaringan pasar. Pemerintah juga perlu menjamin ketersediaan input dan tidak justru mematikan UMK dengan mengundang pemilik usaha dengan modal besar menjadi pesaing yang mematikan.

Inti inklusi keuangan adalah bagaimana menghubungkan orang, baik individu maupun kelompok, kepada bank dan kemudian mendapat manfaat dari keterhubungan tersebut. Dengan demikian, kebijakan inklusi keuangan adalah kebijakan untuk membangun kapasitas sehingga orang tersebut dapat menciptakan peluang ekonomi dan sosial untuk bertahan dan keluar dari guncangan-guncangan karena keterbatasan pendapatan melalui fungsi-fungsi perbankan dan lembaga keuangan, seperti penghipunan dana, penyaluran kredit, asuransi, dan produk-produk keuangan lainnya.

Menurut catatan Bank Dunia, Negara-negara dengan tingkat inklusi keuangan rendah cenderung tingkat kemiskinan dan kesenjangan tinggi. Pada Negara berpenghasilan tinggi, 87 persen penduduk mereka telah tercatat mempunyai rekening pada lembaga keuangan, sementara di Negara berpenghasilan rendah hanya sekitar 24 persen, hanya sekitar 12 persen dari penduduk Negara berpenghasilan tinggi melakukan pinjaman dari individu atau sadara, dan kira-kira sebesar 30 persen pada Negara berpenghasilan rendah. Sekitar 13 persen penduduk Negara berpenghasilan tinggi yang menerima pendapatan mereka melalui lembaga keuangan, dan hanya sekitar 5 persen di Negara-negara berpenghasilan rendah.²⁵

Sementara itu, inklusi keuangan di seluruh provinsi di Indonesia ditunjukkan oleh data hasil Survei Nasional Inklusi Keuangan tahun 2016 cenderung memiliki indeks inklusi keuangan yang tinggi. Provinsi DKI Jakarta adalah yang terbaik karena memiliki indeks literasi keuangan

²⁵ OECD *Economic Surveys: Indonesia 2015*, Originally published by the OECD in English and in French, Bank Dunia, 2015

yang tinggi yaitu 40,0% dan indeks inklusi keuangan 78,2%. Sebaliknya, Provinsi Papua Barat memiliki indeks inklusi keuangan yang relatif rendah. Namun demikian, jumlah provinsi yang memiliki indeks inklusi keuangan yang cukup tinggi dan di atas rata-rata tidaklah banyak.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya bersama untuk mendorong agar semua provinsi di Indonesia memiliki indeks inklusi keuangan yang tinggi (*high literacy – high inclusion*). Untuk itu diperlukan strategi jangka panjang guna mencapai target yang diharapkan yaitu semua daerah memiliki indeks inklusi keuangan yang tinggi. Provinsi yang berada di posisi *low inclusion* perlu didorong untuk lebih banyak memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Sementara provinsi yang berada di posisi *high inclusion* perlu mendapatkan lebih banyak edukasi keuangan agar dapat mengoptimalkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Fakta itu memperkuat keyakinan bahwa mendorong meningkatnya inklusi keuangan merupakan kebijakan tepat untuk memberantas kemiskinan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga keuangan untuk mendorong peningkatan keuangan tersebut sudah berjalan efektif dan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan? Masih perlu dikaji lebih detail.

F. Penutup

Dari paparan makalah dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan sangat ditentukan oleh perkembangan sektor keuangan karena sektor keuangan memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Oleh karena itu, sektor perbankan sebaiknya didorong untuk meningkatkan penyaluran kredit, terutama kredit investasi yang produktif dengan memegang teguh prinsip manajemen resiko. Dengan demikian akan bermunculan proyek investasi, akan mendorong meningkatnya permintaan produk-produk keuangan seperti penyaluran kredit sehingga interaksi antara sektor moneter dengan sektor riil perlu ditingkatkan agar dapat menggerakkan perekonomian nasional.
- Pemerintah perlu mempromosikan kesadaran keuangan, khususnya untuk keluarga berpenghasilan rendah. Hal ini dapat membantu mereka menghindari utang, meningkatkan kegiatan ekonomi mereka, meningkatkan pendapatan keluarga dan melepaskan diri dari kemiskinan. Hal ini dapat terjadi hanya ketika mereka memiliki pengetahuan baik tentang penggunaan jasa keuangan dan produk perbankan. Penerapan inklusi keuangan dapat diterapkan melalui pembayaran sosial kelompok miskin, pemberian kredit dengan skema yang compatible

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*, (OJK: Jakarta, 2017),53

dengan usaha mikro dan kecil disertai dengan penjaminan dana perbankan, serta layanan keuangan digital. Secara keseluruhan, inklusi keuangan merupakan salah satu strategi dalam pencapaian pertumbuhan inklusif yang pada akhirnya akan mereduksi ketimpangan yang ada di masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

G. Referensi Rujukan

A Demirguç-Kunt,., Beck T., Honohan P. “*Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access*”. Washington D.C.: A World Bank Policy Research Report, 2008).

Ali dan Zhuang, *Defining and Measuring Inclusive Growth: Application to the Philippines*, Asian Development Bank, 2007

Badan Pusat Statistik

Departemen Pengembangan akses Keuangan dan UMKM, *Boklet Keuangan Inklusif*, Bank Indonesia, 2014

<https://syafaatmuhari.wordpress.com/2017/02/17/mendorong-inovasi-meningkatkan-daya-saing-global-1/>

Gerald M. Meler, *Frontiers of Development economics The Future In Perspective*, Oxford is a registered trademark of Oxford University Press, 2001

Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers Survei OJK 2019: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Meningkat*, SP 58/DHMS/OJK/XI/2019.

Josua Pardede, *Menuju Ketangguhan Ekonomi; Sumbangan 100 Ekonom Indonesia: Inklusi Keuangan Untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2017

Kuri Pravat Kumar, Laha Arindam, *Rural Credit Market and the Extent of Tenancy: Micro Evidence from Rural West Bengal*, Ind. Jn. of Agri. Econ. Vol.66, No.1, Jan.-March 2011

Lederle Nicole, *Exploring the Impacts of Improved Financial Inclusion on the Lives of Disadvantaged People*, Heriot-Watt University School of the Built Environment, 2009

Mohammed Ibrahim Jabir, *Financial Inclusion And Poverty Reduction In Subsaharan Africa*, College Of Humanities University Of Ghana, 2015

OECD *Economic Surveys: Indonesia 2015*, Originally published by the OECD in English and in French, Bank Dunia, 2015

Ogunsakin, Sanya, Fawehinmi Festus Olumide, *Financial Inclusion as an Effective Policy Tool of Poverty Alleviation: A Case of Ekiti State*, IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), Volume 8, Issue 4 Ver. II, (Jul.– Aug.2017

Onaolupo, (2015), Levine, (2005), dalam Ogunsakin, Sanya, Fawehinmi Festus Olumide, *Financial Inclusion as an Effective Policy Tool of Poverty Alleviation: A Case of Ekiti State*, IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF) e-ISSN: 2321-5933, p-ISSN: 2321-5925. Volume

Otoritas Jasa Keuangan, 2017. *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*, OJK: Jakarta

Piotrowska Maria, *The Direct and Indirect Effects of the Pro-Poor Growth*, 2004), 252, dan Ravallion, *A Poverty-Inequality Trade-off? World Bank Policy Research; Working Paper 3579*, April 2005). *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 18, Nomor 3, Januari 2016.

Ravi Kanbur dan Lyn Squire, 2010, dalam Stephan Klasen, *Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals*, Asian Development Bank, 2010

Sanjaya I Made, Nursechafia, “*Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia*”, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*”, Volume 18, Nomor 3, Januari 2016.

Stephan Klasen, *Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals*, Asian Development Bank, 2010.

ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP *ECONOMIC VALUE ADDED* PADA PERUSAHAAN BURSA EFEK INDONESIA MELALUI PENDEKATAN STRUKTURAL EQUATION MODEL – PARTIAL LEAST SQUARE

*Yusrianti Hanike , Damirah
IAIN Ambon, IAIN Parepare*

Email : yusriantihanike@iainambon.ac.id

ABSTRACT

Stock movements is a trending topic, especially with the development of capital markets in the country. Financial ratios are a wrong measure in looking at a company's ability to manage its economic capabilities. While Economic Value Added is a performance appraisal that can drive company performance. Through SEM-PLS, the resulting model is able to identify indicators of financial ratios to EVA. SEM-PLS is a quantitative modeling of factors that show the relationship between several dependent and independent factors through its indicators. SEM - PLS analysis is a combination of path analysis and regression analysis. In this research, financial ratios include liquidity ratios, activities, profitability and solvency. The analysis includes BEI data in the field of Manufacturing in 2016. Based on the results of the study it can be concluded that through financial ratios namely profitability ratios and activity ratios are able to show that the elements have a relationship to the elements in the financial statements namely EVA. Indicators that are not good in explaining financial ratios affect the relationship to financial statement variables, namely EVA.

Keywords: Financial ratio, EVA, SEM-PLS

ABSTRAK

Pergerakan saham menjadi topik hangat terutama dengan berkembangnya pasar modal di tanah air. Rasio keuangan adalah salah ukuran dalam melihat kemampuan perusahaan dalam mengelola kemampuan ekonominya. Sementara *Economic Value Added* merupakan penilaian kinerja yang dapat mendorong kinerja perusahaan. Melalui SEM-PLS, model yang dihasilkan mampu mengidentifikasi indikator-indikator rasio keuangan terhadap EVA. SEM-PLS merupakan pemodelan kuantitatif faktor-faktor yang menunjukkan hubungan antara beberapa faktor dependen dan independen melalui indikator-indikatornya. Analisis SEM – PLS merupakan kombinasi analisis jalur (*Path Analysis*) dan analisis regresi. Pada penelitian ini rasio keuangan meliputi rasio likuiditas, aktivitas, profitabilitas dan solvabilitas. Analisis meliputi data BEI di bidang Manufaktur tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa melalui rasio keuangan yakni rasio profitabilitas dan rasio aktivitas mampu menunjukkan bahwa unsur-unsurnya memiliki hubungan terhadap unsur-unsur pada laporan keuangan yakni EVA. Indikator-indikator yang kurang baik dalam menjelaskan rasio keuangan mempengaruhi hubungannya terhadap variabel laporan keuangan yakni EVA.

Keywords : Rasio keuangan, EVA, SEM-PLS

PENDAHULUAN

Era globalisasi menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya agar mampu menghasilkan produk berkualitas yang mampu bersaing dengan produk-produk lain. Dengan demikian perusahaan akan bisa mempertahankan eksistensinya di pasar lokal maupun pasar global,

sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tujuan utama dari sebuah perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba yang maksimal, namun saat ini tujuan perusahaan tidak hanya laba akuntansi, melainkan juga berfokus pada laba ekonomis. Para *stakeholders* terutama investor membutuhkan analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi agar modal yang mereka investasikan mendapat tingkat pengembalian (*Rate of return*) yang menguntungkan sebanding dengan risiko yang mereka ambil.

Pada umumnya analisis laporan keuangan yang dilakukan perusahaan untuk mengukur kinerja keuangannya adalah dengan menggunakan metode konvensional yaitu analisis rasio keuangan. Dalam praktiknya walaupun analisis rasio keuangan yang digunakan memiliki fungsi dan kegunaan yang cukup banyak bagi perusahaan dalam mengambil keputusan, bukan berarti rasio keuangan yang dibuat sudah menjamin 100% kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya.¹ Penggunaan analisis rasio keuangan memiliki kelemahan utama yaitu tidak memperhatikan risiko yang dihadapi perusahaan dengan mengabaikan adanya biaya modal. Untuk mengatasi kelemahan dari analisis rasio keuangan, maka dikembangkan konsep pengukuran kinerja keuangan berdasarkan nilai tambah (*Value added*) yaitu *Economic Value Added* (EVA) dan *Market Value Added* (MVA). Menurut Winarto (2010:4) kedua metode nilai tambah ini dapat dijadikan acuan yang lebih baik bagi pemilik modal untuk mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut akan memberikan keuntungan atau kerugian terhadap modal yang diinvestasikan.²

Perubahan yang pesat di segala bidang dewasa ini telah menyebabkan terjadinya berbagai revolusi pemikiran di bidang ilmu pengetahuan, tidak terkecuali pengetahuan dibidang ekonomi, manajemen dan bisnis. Maka sebagai dampaknya lahirlah “cara-cara” baru bagi pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas usahanya. Dalam bidang keuangan, sudah lama para praktisi mencoba memikirkan sesuatu cara untuk mengukur kinerja perusahaan secara tepat dengan memperlihatkan sepenuhnya kepentingan dan harapan penyedia dana. Selama ini ukuran yang dipakai untuk melakukan penilaian terhadap perusahaan sangat beragam dan terkadang berbeda dari satu industri ke industri lainnya.

Salah satu teknik untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah *Economic Value Added* (EVA). EVA merupakan salah satu konsep ukuran kinerja keuangan yang dipopulerkan pertama kali oleh analisis keuangan, Stewart dkk (2009) dalam usahanya untuk memperoleh jawaban terhadap metode penilaian yang lebih baik. Metode ini digunakan terutama disebabkan

¹ Kasmir, Analisis Laporan Keuangan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hlm 103.

² Jacinta Winarto, Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Menggunakan Metode Market Value Added (MVA), (2010) Hlm 4.

terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dan ketidakpastian dalam pengukuran kinerja tradisional, sehingga para praktisi dan akademisi mencoba untuk mengembangkan konsep baru dalam pengukuran kinerja.³

EVA merupakan suatu perangkat finansial untuk mengukur keuntungan nyata operasi perusahaan. Fenomena yang membuat EVA berbeda dengan penghitungan konvensional lain adalah digunakannya biaya modal dalam penghitungan konvensional.

Kondisi EVA yang positif mencerminkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada tingkat biaya modal. EVA yang positif menunjukkan kemampuan manajemen dalam menciptakan peningkatan nilai kekayaan perusahaan / pemilik modal dan sebaliknya, EVA negatif menyiratkan adanya penurunan nilai kekayaan. Perusahaan mempunyai kinerja yang semakin bagus bila mampu menghasilkan nilai EVA yang semakin positif. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen telah menjalankan tugasnya dengan baik. Suatu perusahaan publik yang menghasilkan nilai EVA negatif meskipun mampu membukukan laba bersih yang tinggi sekalipun, berarti perusahaan ini belum mampu menghasilkan tingkat pengembalian modal yang sepadan untuk menutup resiko dan biaya investasi yang ditanamkan pemilik modal (investor). Atau secara lebih sederhana jika dana pemilik modal tersebut ditanam pada investasi bebas resiko seperti SBI (Sertifikat Bank Indonesia) atau deposito, hasilnya justru akan lebih besar tanpa keluar keringat dan ketakutan terkena resiko fluktuasi di tengah kondisi yang tidak menentu.

EVA berangkat dari konsep biaya modal, yakni resiko yang dihadapi perusahaan dalam melakukan investasinya. Semakin tinggi tingkat resiko investasi, semakin tinggi pula tingkat kembalian (pendapatan) yang dituntut investor. Pada dasarnya didirikannya setiap perusahaan mempunyai sasaran tertentu yang ingin dicapai yaitu meningkatkan nilai perusahaan yang merupakan syarat mutlak dalam menjamin kelangsungan dan perkembangan perusahaan. Agar sasaran tersebut dapat dicapai maka diperlukan adanya suatu rangkaian yang teratur dan terintegrasi antara fungsi-fungsi yang terdapat dalam perusahaan diantaranya adalah fungsi keuangan, produksi, pemasaran dan sebagainya.

Ditinjau dari fungsi tersebut, salah satu aspek yang sangat menentukan dalam perusahaan adalah aspek keuangan. Peranan aspek keuangan biasanya sangat erat hubungannya dengan manajemen puncak pada struktur organisasi perusahaan. Oleh karena keputusan-keputusan dibidang keuangan menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Setiap kejadian penting dalam

³Richard A Brealey, Stewart C. Myers, dan Alan J. Marcus, Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan. (Jakarta: Erlangga, 2009).

kehidupan perusahaan mengandung aspek keuangan seperti keputusan untuk menambah modal perusahaan melalui hutang/pinjaman.

Memahami pentingnya kinerja keuangan terhadap EVA pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI . Berdasarkan kenyataan yang dikemukakan diatas menjadi penting untuk diteliti dalam rangka memberika solusi untuk memperbaiki kinerja keuangan terhadap EVA pada perusahaan manufaktur yang Listing di BEI.

LANDASAN TEORI

A. Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah: Neraca atau laporan Laba/Rugi, atau hasil usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi Keuangan. Laporan keuangan inilah yang ,menjadi bahan sarana informasi bagi analis dalam proses pengambilan keputusan (Harahap, 2010).⁴

Laporan keuangan yang disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memahami sejumlah besar pemakai. Namun demikian laporan keuangan tidak menyajikan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian dimasa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Untuk menjalankan organisasi, pengolahan keuangan salah satu faktor pendukung, karena dalam kondisi keuangan yang baik maka aktivitas organisasi dapat dijaga kelangsungannya, melalui pengolahan keuangan, maka kemampuan suatu instansi atau perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, beban tetap yang harus dibayar, serta nilai dana yang tersimpan saat ini dapat dinilai.

B. Kinerja Keuangan

Dalam konsep kinerja keuangan, tidak cukup dengan membaca laporan keuangan dengan melakukan analisis rasio keuangan, tetapi perlu juga dibuat analisis tambahan yang sering disebut analisis trend perlakuan organisasi terhadap pengaruh kinerja keuangan.

Kinerja keuangan adalah analisis keuangan yang pada dasarnya dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja dimasa lalu , dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensipotensi yang kinerjanya akan berlanjut.

⁴ Sofyan Syafri Harahap, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Dalam menganalisis kinerja keuangan, alat analisis yang biasa digunakan adalah analisis rasio yaitu perbandingan dari data keuangan perusahaan yang berhubungan sehingga dapat memperoleh gambaran tentang kinerja perusahaan. Analisis kinerja terbaru yang dikembangkan oleh lembaga konsultan Stern Stewart dan Co. mulai digunakan yaitu analisis nilai tambah ekonomis (*Economic Value Added /EVA*) dan nilai tambah pasar (*Market Value Added/MVA*). EVA mempertimbangkan biaya modal sehingga kepentingan pemegang saham terpenuhi.

C. EVA (*Economic Value Added*)

EVA (*Economic Value Added*) merupakan metode penilaian kinerja keuangan perusahaan berdasarkan nilai tambah (*Value added*). Metode EVA pertama kali dikembangkan oleh Stewart & Stern seorang analis keuangan dari perusahaan Stern Stewart & Co pada tahun 1993. Di Indonesia metode tersebut dikenal dengan metode NITAMI (*Nilai Tambah Ekonomi*). Menurut Tunggal (2010) dalam Iramani dan Febrian (2011:3) “EVA/NITAMI adalah metode manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta manakala perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi (*operating cost*) dan biaya modal (*cost of capital*)”⁵. Menurut Young & O’byrne (2010:18) “EVA merupakan alat komunikasi yang efektif, baik untuk penciptaan nilai yang dapat dijangkau oleh manajer lini yang akhirnya mendorong kinerja perusahaan dan untuk berhubungan dengan pasar modal”⁶.

Menurut Warsono (2012:48), EVA adalah perbedaan antara laba operasi setelah pajak dengan biaya modalnya. Jadi EVA suatu estimasi laba ekonomis yang benar atas suatu bisnis selama satu tahun tertentu. Dalam menghitung EVA ada tiga variabel yang penting yaitu NOPAT (*Net Operating Profit After Tax*) atau biaya modal dan EVA atau nilai tambah ekonomis itu sendiri.⁷

D. Rasio Keuangan

Gaskin (2010 : 2) mengemukakan bahwa rasio keuangan adalah suatu nilai yang diperoleh dari dua atau lebih angka yang diambil dari pembukuan suatu bisnis atau organisasi. Rasio analisis keuangan meliputi dua jenis perbandingan. Pertama, analisis dapat membandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang untuk perusahaan yang sama (perbandingan internal). Kedua, perbandingan rasio perusahaan dengan perusahaan lainnya

⁵ Rr Iramani dan Febrian, *Financial Value Added: Suatu Paradigma dalam Pengukuran Kinerja dan Nilai Tambah Perusahaan* (,2012) Hlm 3.

⁶ S.David Young dan Stephen F. O’Byrne, *EVA and Value Based Magement: A Practical Guide to Implementation* (New York: MC Graw Hill, 2010) Hlm 18.

⁷ Warsono, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2012) Hlm 48.

yang sejenis atau dengan rata-rata industri pada satu titik yang sama (perbandingan eksternal). Rasio keuangan dirancang untuk membantu mengevaluasi laporan keuangan setiap bentuk dari analisis rasio mempunyai tujuan tertentu atau digunakan untuk menentukan perbedaan penekanan hubungan (Brigham dan Houton , 2013).⁸

Menurut Alwi (2010 : 109) rasio-rasio keuangan pada umumnya diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu : rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas.⁹ Sartono (2011:116) mengemukakan bahwa likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Tingkat likuiditas ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar.¹⁰

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas (liquidity ratio) adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Untuk mengetahui posisi likuiditas suatu perusahaan, digunakan beberapa angka perbandingan rasio antara lain :

- a. **Current Ratio.** Menurut Sutrisno (2010 : 247) Current Ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Hasil dari perbandingan ini menunjukkan seberapa jauh tuntutan kreditor jangka pendek dapat dipenuhi oleh harta perusahaan yang diperkirakan dapat menjadi tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo hutang.¹¹
- b. **Cash Ratio.** Cash ratio merupakan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang segera diuangkan dimana telah diketahui bahwa kas merupakan elemen harta lancar yang paling tinggi likuiditasnya karena semakin banyak uang kas yang tersedia dalam perusahaan semakin baik, sebab disamping keperluan jangka pendek dapat pula berguna untuk menjaga keperluan yang mendesak.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan apabila perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Jika perusahaan dilikuidasi, apakah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut cukup untuk memenuhi semua hutang-hutangnya.

Rasio solvabilitas menggambarkan perbandingan antara dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan dengan dana dari kreditor. Perusahaan dengan rasio solvabilitas atau rasio

⁸ F. Eugene Brigham dan Joel F. Houston, Dasar-dasar Manajemen Keuangan (Jakarta: Salemba Empat, 2013)

⁹ Iskandar Alwi, Pasar Modal Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Yayasan Pancar Siwah, 2010) Hlm. 109.

¹⁰ Agus Sartono, Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: BPFE, 2011) Hlm. 116.

¹¹ Sutrisno, Manajemen Keuangan: Teori, Konsep, dan Aplikasi (Yogyakarta : Ekonosia, 2010) Hlm 247.

leverage yang rendah akan memiliki rasio rugi yang lebih kecil. Jika kondisi ekonomi sedang fluktuatif atau menurun, tapi juga memberikan hasil pengembalian yang lebih rendah pada waktu ekonomi sudah membaik. Sebaliknya perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi akan mempunyai kerugian yang besar demikian pula dapat memberikan prospek untuk mendapatkan laba yang tinggi. Keputusan manajemen untuk menggunakan leverage hendaknya mengembangkan hasil pengembalian yang lebih tinggi terhadap peningkatan risiko.

Riyanto (2010 :32) mengemukakan bahwa solvabilitas dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa angka perbandingan rasio yaitu :

- a. **Debt to Total Aseet Ratio.** Rasio total hutang mengukur prosentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Yang dimaksud dengan hutang adalah semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin kecil nilai rasio ini berarti kinerja perusahaan semakin meningkat.
- b. **Debt to Equity Ratio.** Rasio hutang dengan modal sendiri merupakan imbalan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi Rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Bagi perusahaan, sebaiknya besarnya hutang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Besarnya hutang maksimal sama dengan modal sendiri, artinya Debt to Equity maksimal 100% .

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas yang digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara efektif. Rasio aktivitas membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis harta. Kalau rasio aktivitas dijadikan sebagai patokan maka dengan sendirinya diperlukan adanya keseimbangan yang layak antara penjualan dengan beberapa unsur harta seperti : persediaan piutang, harta tetap dengan harta – harta lainnya.¹²

Rangkuti (2010:74) mengemukakan bahwa rasio aktivitas bertujuan untuk mengukur seberapa jauh aktivitas perusahaan dalam menggunakan dana-dananya secara efektif dan efisien. Rasio ini dapat mengukur efisiensi-efisiensi kegiatan operasional suatu perusahaan karena rasio ini didasarkan pada perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran pada periode waktu tertentu. Rasio- rasio aktivitas meliputi :

- a. **Total Assets Turnover** . Perputaran harta yang membandingkan seluruh penjualan dengan seluruh harta. Hasil perhitungan ini menunjukkan volume bisnis yang dihasilkan perharta yang

¹² Riyanto, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, (Yogyakarta: BPFE,2011) Hlm. 32

diinvestasikan. Makin tinggi angka yang dihasilkan berarti perusahaan tersebut makin baik karena menghasilkan volume bisnis yang relatif tinggi.

- b. Invebtory Turnover.** Persediaan merupakan komponen utama dari barang yang dijual, oleh karena itu semakin tinggi persediaan berputar, semakin efektif perusahaan dalam mengelola persediaan.

4. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas menggambarkan efektivitas manajemen jika dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi yang dihasilkan. Profitabilitas merupakan kinerja yang dihasilkan oleh manajemen. Profitabilitas dapat dilihat sebagai margin laba atas penjualan dan hasil pengembalian modal sendiri.¹³

Rangkuti (2010 : 77) mengemukakan bahwa rasio profitabilitas adalah ukuran untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaannya. Efektivitas manajemen meliputi kegiatan fungsional manajemen, seperti keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, operasional. Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.¹⁴

Untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan menurut Sutrisno (2010:254) dapat dilakukan dengan menghitung:

- a. Profit Margin.** Merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai.
- b. Return on Asset (ROA).** Merupakan ukuran Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.
- c. Return on Equity (ROE).** Meupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kentungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE sering disebut sebagai rentabilitas modal sendiri.¹⁵

Rasio-rasio nilai pasar menggunakan angka yang diperoleh dari laporan keuangan dan pasar modal . Rasio tersbut adalah Price earning ratio yang membandingkan antara harga saham yang diperoleh pemilik perusahaan dan Market to book value ratio yang membandingkan antara harga saham dan nilai buku per saham. Rasio keuangan adalah suatu alat pengukuran kinerja perusahaan dari data laporan keuangan. Laporan keuangan suatu perusahaan meliputi neraca, laporan rugi laba dan laporan cash flow. Hasil analisis ini akan mengungkapkan mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Raharjo (2011 : 120) mengklasifikasikan rasio keuangan

¹³ Rangkuti, , Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2011) Hlm. 74.

¹⁴ Ibid, Hlm 77.

¹⁵ Ibid, Hlm 254.

menjadi lima kelompok yaitu : rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio investasi. Rasio investasi menunjukkan rasio investasi dalam surat berharga atau efek, khususnya saham dan obligasi.¹⁶ Menurut Harahap (2010 : 299) selain rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas, masih banyak rasio yang dapat memberikan informasi bagi analisis misalnya : rasio leverage, rasio produktivitas, rasio pasar modal, dan rasio pertumbuhan.¹⁷

E. Structural Equation Model

Penggunaan model matematika pada berbagai bidang memudahkan dalam manajemen resiko pada kasus-kasus tertentu. Namun, tidak semua kasus dapat dikonstruksikan secara langsung. Penggunaan analisis regresi tidak mampu di beberapa konsep teoritis yang diukur secara tidak langsung. Jika faktor dikonstruksikan melalui indikator-indikator baru akan menimbulkan masalah baru, pengukuran dan hubungan kausal antar faktor, sehingga perlu analisis yang lebih kompleks. Salah satu analisis yang dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah *Structural Equation Modelling* (SEM). SEM adalah pemodelan kuantitatif faktor-faktor yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara beberapa faktor dependen dan independen melalui indikator-indikatornya. Analisis SEM merupakan kombinasi dari analisis faktor (Confirmatory Factor Analysis), analisis jalur (*Path Analysis*) dan analisis regresi.

Analisis jalur pada SEM berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam penyampaian tentang konsep dasar SEM agar berjalan secara efektif. Analisis jalur dapat menggambarkan dan menspesifikasikan model SEM dengan lebih jelas dan lebih mudah. Analisis jalur juga dapat membantu mempermudah konversi model tersebut ke dalam model matematika. *Structural Equation Modelling* (SEM) merupakan salah satu analisis *multivariate* yang dapat menganalisis hubungan variabel secara kompleks. Analisis ini pada umumnya digunakan untuk penelitian-penelitian yang menggunakan banyak variabel (*multivariate*) dan dapat menganalisa model yang rumit secara simultan. SEM juga merupakan model analisis sebab akibat yang dapat menampilkan model secara komprehensif bersamaan dengan kemampuan untuk mengkonfirmasi dimensi atau faktor dari sebuah konsep yang diujikan melalui indikator-indikator empiris. Umumnya analisa SEM digunakan untuk menguji sebuah konsep teoritis / melakukan konfirmasi terhadap sebuah konsep teoritis. (Matjik,2011).¹⁸

¹⁶ Budi Raharjo, Laporan Keuangan Perusahaan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011) Hlm 120.

¹⁷ Ibid Hlm 299.

¹⁸ Matjik, dkk, (Sidik Peubah Ganda Dengan Menggunakan SAS, (Bogor: IPB Press, 2011)

F. Partial Least Square

PLS pertama kali dikembangkan oleh Herman Wold sekitar akhir tahun 1960-an untuk mengolah data dibidang ekonometrik sebagai alternatif SEM dengan dasar teori yang lemah dan berfungsi hanya sebagai alat analisis penduga (tidak untuk pengujian model). Pada mulanya PLS diberi nama NIPALS (Nonlinier Iteratif Partial Least Square). PLS merupakan jenis SEM yang berbasis komponen dengan sifat konstruk formatif. Desain PLS dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan regresi OLS ketika data mengalami beberapa permasalahan seperti yang telah dikemukakan pada pendahuluan paper ini. Metode Least Square dirancang untuk menduga β_0 dan β_1 dengan model $y_i \text{ duga} = \beta_0 + \beta_1 x_i$.

Menurut Kumala Indriati, metode PLS adalah salah satu metode yang dapat mengatasi masalah kolinieritas yang sering terjadi dalam analisis regresi berganda. Sedangkan menurut Zainal Mustafa dan Tony Wijaya, PLS merupakan metode yang dapat menjelaskan struktur keragaman data. PLS adalah suatu teknik statistik multivariat yang bisa menangani banyak variabel respon dan variabel eksplanatori sekaligus. PLS merupakan alternatif yang baik untuk metode analisis regresi berganda dan regresi komponen utama karena metode PLS bersifat lebih robust, artinya parameter model tidak banyak berubah ketika sampel baru diambil dari total populasi.

PLS terbagi menjadi dua yaitu model PLS Regression (PLS-R) dan PLS Path Modeling (PLS-PM). PLS Path Modeling dikembangkan sebagai alternatif SEM yang dasar teorinya lemah. PLS-PM berbasis ragam berbeda dengan metode SEM dengan software AMOS, Lisrel, EQS menggunakan basis koragam. Dengan menggunakan ragam based, distribusi data tidak menjadi masalah,. Skala pengukuran dapat berupa nominal, ordinal, interval maupun rasio. Model pengukuran dapat berupa reflektif maupun formatif.

Sebagaimana yang dinyatakan Wold selaku pengembang PLS, PLS merupakan metode analisis yang powerfull karena tidak didasarkan pada banyak asumsi yang dipersyaratkan, data tidak harus berdistribusi normal, indikator dengan skala nominal, ordinal, interval, dan rasio dapat digunakan pada model yang sama dan sampel tidal harus besar.

Adapun prinsip dasar penggunaan pendekatan SEM ataupun PLS, apakah model persamaan struktural digunakan untuk uji dan pengembangan teori ataukah untuk tujuan penduga. Apabila tujuan utamanya untuk menguji dan pengembangan model, pendekatan berdasarkan koragam merupakan metode yang paling sesuai. Namun jika terjadi ketidakpastian dari pendugaan skor faktor (factor indeterminacy) maka akan menyebabkan menurunnya keakuratan penduga. Sedangkan jika untuk tujuan penduga, maka pendekatan berbasis ragam seperti PLS lebih tepat,

terutama dengan indikator yang bersifat formatif. Dengan variabel laten berupa kombinasi linier dari indikatornya, maka penduga nilai dari variabel laten dapat dengan mudah diperoleh, sehingga penduga terhadap variabel laten yang dipengaruhi juga dapat dengan mudah dilakukan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, jika memilih menggunakan PLS, selain permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, menurut Falk dan Miller jika ditemui data tidak harus berdistribusi normal multivariate, sampel kecil (minimal sampel >30 dapat digunakan) maka dapat menggunakan PLS.

PLS selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif. PLS mampu mengestimasi model yang besar dan kompleks dengan ratusan variabel laten dan ribuan indikator.

PLS dibutuhkan jika model mengindikasikan lebih dari satu variabel terikat, data tidak bersifat multivariate normal, model penelitian melibatkan item formatif dan item reflektif sekaligus. Menurut Fornell and Bookstein, PLS memiliki kemampuan memetakan seluruh jalur ke banyak variabel terikat dalam satu model penelitian yang sama dan menganalisis semua jalur dalam model struktural secara simultan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari publikasi laporan keuangan yang memberikan informasi EVA, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas pada 45 perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta dimuat dalam *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)* dan *Annual Report* yang diakses pada website resmi BEI.

Variabel endogen berupa EVA. Variabel eksogen adalah rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Data dianalisis menggunakan SEM-PLS program Smart-PLS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Model

Evaluasi model dapat dilakukan menggunakan validitas konvergen pada model reflektif dengan melihat loading factor. Sedangkan model formatif tidak dapat menggunakan loading factor tetapi dengan koefisien regresi. Nilai loading factor disarankan diatas 0,4.

Berdasarkan nilai pada outer loading dapat diketahui bahwa seluruh indikator dapat digunakan pada analisis lanjutan.

Tabel 1. Hasil outer loading

Indikator <- variabel laten	Original sampel (koefisien parameter)	t-statistics
Cr <- Rasio Likuiditas	0.778	1.728
Cr2 <- Rasio Likuiditas	0.832	1.87
DAR <- Rasio Solvabilitas	0.995	2.163
DER <- Rasio Solvabilitas	0.472	1.409
EVA1 <- EVA	0.978	21.108
EVA2 <- EVA	0.444	1.423
IT <- Rasio Aktivitas	0.416	1.771
ROA <- Rasio Profitabilitas	0.456	1.439
ROE <- Rasio Profitabilitas	0.974	9.438
TAT <- Rasio Aktivitas	0.94	11.194

B. Evaluasi variabel (formatif)

Evaluasi model pada model formatif dengan melihat nilai koefisien regresi pada outer weight.

Tabel 2. Hasil outer weight

Indikator <- variabel laten	Original sampel (koefisien parameter)	t-statistics	P-Values
Cr <- Rasio Likuiditas	0.581	1.272	0.102
Cr2 <- Rasio Likuiditas	0.658	1.437	0.075
DAR <- Rasio Solvabilitas	0.954	1.656	0.049
DER <- Rasio Solvabilitas	0.107	0.251	0.401
EVA1 <- EVA	0.925	8.034	0.000
EVA2 <- EVA	0.215	0.926	0.177
IT <- Rasio Aktivitas	0.343	1.89	0.029
ROA <- Rasio Profitabilitas	0.233	0.996	0.016
ROE <- Rasio Profitabilitas	0.918	6.653	0.000
TAT <- Rasio Aktivitas	0.912	8.363	0.000

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Current Rasio (Cr) dan Cash Rasio (Cr2) kurang baik dalam menduga rasio likuiditas dan begitupula pada Debet to Equity Rasio (DER) dalam menduga rasio Solvabilitas.

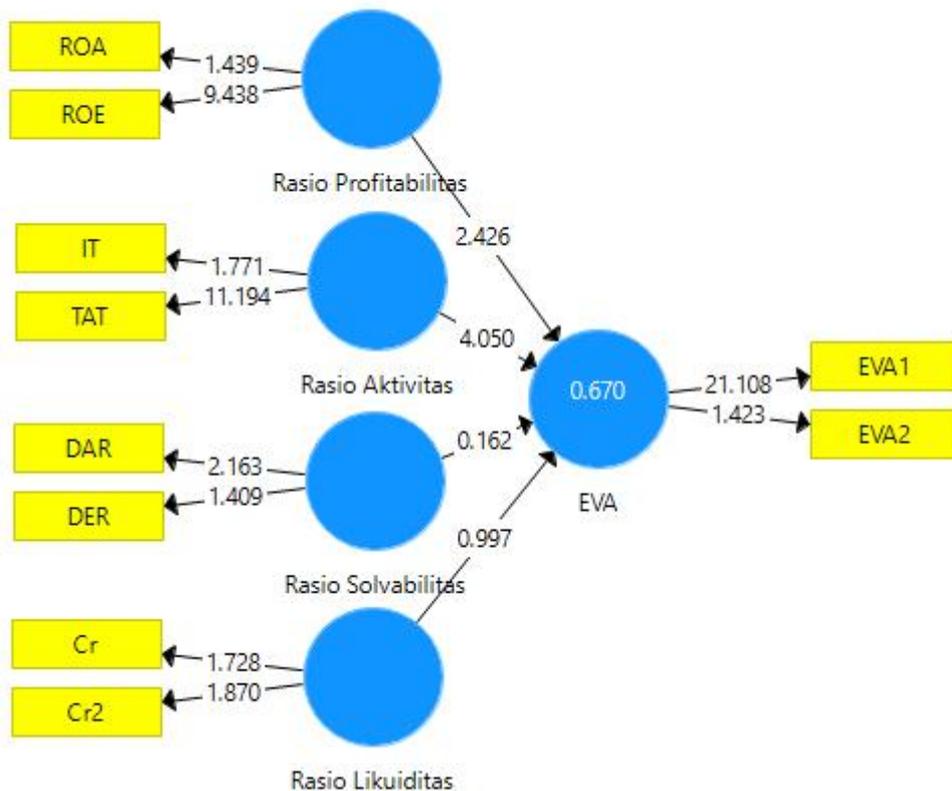
C. Analisis Pengaruh

Analisis pengaruh variabel laten bebas terhadap variabel laten terikat dapat dilihat pada Path Coefficient (Mean, stdev, t-value) sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Path Coefficient

	Original Sample	T Statistics	P Values
Rasio Aktivitas -> EVA	0.595	4.05	0.000
Rasio Likuiditas -> EVA	0.133	0.997	0.159
Rasio Profitabilitas -> EVA	0.405	2.426	0.008
Rasio Solvabilitas -> EVA	0.022	0.162	0.436

Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan rasio aktivitas dan rasio profitabilitas memiliki pengaruh terhadap EVA. Tidak setiap rasio keuangan menunjukkan hasil yang signifikan terhadap EVA. Menurut Djarwanto (2011 : 123) rasio dalam analisa laporan keuangan adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan.¹⁹ Sehingga, unsur – unsur pada rasio pada bidang manufaktur BEI di tahun 2016 yang menunjukkan hubungan terhadap laporan keuangan (EVA) yakni rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Hal tersebut senada dengan evaluasi model yang menunjukkan indikator pada rasio likuiditas dan rasio solvabilitas kurang baik dalam pendugaan.



¹⁹ Djarwanto, Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan, (BPFE. Yogyakarta: BPFE, 2011) Hlm. 123.

Nilai R square dapat dilihat pada quality criteria > overview pada teks output (PLS algorithm) sebagai berikut :

Tabel 3. R -Square

	Original Sample	T Statistics	P Values
EVA	0.670	10.290	0.000

Berdasarkan hasil diatas, dapat diinterpretasikan bahwa estimasi hubungan EVA dan Rasio Keuangan sebesar 0,670 atau 67% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa melalui rasio keuangan yakni rasio profitabilitas dan rasio aktivitas mampu menunjukkan bahwa unsur-unsur pada rasio tersebut memiliki hubungan terhadap unsur-unsur pada laporan keuangan yakni EVA. Indikator-indikator yang kurang baik dalam menjelaskan rasio keuangan mempengaruhi hubungannya terhadap variabel laporan keuangan yakni EVA.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Z. Iskandar. 2010. Pasar Modal Teori dan Aplikasi. Jakarta: Yayasan Pancar Siwah.
- Agus, Sartono. 2011. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE.
- Beaver, Wiliam H. 1968. The information content of annual earning realises: A Trading Volume Approach. Supplement to journal of accounting Research.
- Brealey, Richard A, Stewart C. Myers, dan Alan J. Marcus. 2009. Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan. Jilid 1. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga Brigham, F. Eugene dan Joel F. Houston. 2013. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Jakarta: Salemba Empat
- Djarwanto. 2011. Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan. Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta
- Ghozali, I. Fuad 2005. Structural Equation Modeling-Teori. Konsep dan Aplikasi dengan program LISREL 8.54. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Fernandes, A.A.F., Solimun, Prina E. Kajian Korelasi Antar Measurement Error pada Analisis Struktural Equation Model. FMIPA UB.
- Foster, George. 1986. Financial Statement Analysis. Second Edition, Englewood Cliffs, New Jersey. Prentice Hall.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2010. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Edisi 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Hartono, Jogiyanto. 1998. Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan terstruktur teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Yogyakarta: Andi Offset.
- Iramani, Rr dan Febrian, E. 2012. Financial Value Addad : Suatu Paradigma dalam Pengukuran Kinerja dan Nilai Tambah Perusahaan.
- Jogiyanto, Hartono. 2013. Teori Portofolio dan Analisis Investasi.Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.
- Kasmir. 2010. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Matjjik dkk, 2011. *Sidik Peubah Ganda Dengan Menggunakan SAS*. IPB Press. Bogor.
- Rangkuti. 2011. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tandelilin, Eduardus. 2010. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Edisi Ketujuh. Kanisius. Yogyakarta.
- Warsono.2012. Manajemen Keuangan Perusahaan. Malang : Bayu Media Publishing.
- Winarto, Jacinta, 2010, Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Menggunakan Metode Market Value Added (MVA).
- Young, S. David and Stephen F. O'Byrne.2010.EVA dan Value-Based Management: A Practical Guide to Implementation, New York: MC Graw Hill.

IMPLEMENTASI PROGRAM KOPERASI UNIT DESA (KUD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA HILA KECAMATAN LEIHITU MALUKU TENGAH

Muhammad Idul Launuru
IAIN Ambon
Email: idullaunuru88@gmail.com

ABSTRACT

Cooperatives are economic organizations with an emphasis on family-based fraternity. Cooperatives are present in the midst of the community with the task and purpose for the welfare of the community in particular and society in general. One of the co-operative is the Village Unit Cooperatives Hila conducting business units: savings and loans unit, processing or marketing of products, providing or distributing agricultural inputs and marine, provide the needs of consumer goods and provide all kinds of service.

This study used qualitative methods, because researchers want to determine the extent of the activities developed in the field of entrepreneurship. This case study was conducted by the Village Unit Cooperatives Hila, the role of cooperatives in improving the welfare of the people in the villages around Hila, as well as obstacles in any improvement in the welfare of the community through the cooperative village of Hila

The results show that the efforts made Hila village cooperatives in improving the welfare of its members by way of Agriculture (Farmers), Cooperative Program in the Field Group Fishermen Cooperative Program in Business Economics, Social Sector Program, Cooperative Program to improve welfare society. Implementation of the program Hila Village Unit Cooperatives play an important role in society, with the activities of the program Hila Village Unit Cooperatives to boost the living standards of the people's welfare society.

Keywords: Implementation, Program, KUD, Prosperity

ABSTRAK

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dengan mengutamakan rasa persaudaraan. Koperasi hadir di tengah-tengah masyarakat dengan mengemban tugas dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota masyarakat pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Salah satu bentuk koperasi adalah Koperasi Unit Desa Hila yang menjalankan unit usaha : unit simpan pinjam, pengolahan atau pemasaran hasil produksi, menyediakan atau menyalurkan sarana produksi pertanian dan kelautan, menyediakan keperluan barang-barang konsumsi dan menyediakan segala macam bentuk jasa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana kegiatan-kegiatan dibidang kewirausahaan yang dikembangkan. Studi kasus ini dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Hila, peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Desa Hila, serta kendala dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Hila melalui koperasi

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan KUD Desa Hila dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya yaitu dengan cara Program Bidang Pertanian, Program KUD Di Bidang Kelompok Nelayan, Program KUD Usaha Di Bidang Ekonomi, Program Usaha Bidang Sosial, Program Bantuan KUD Untuk Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat. Implementasi dari program Koperasi Unit Desa Hila sangat berperan penting dalam masyarakat, dengan adanya kegiatan program Koperasi Unit Desa Hila untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat tersebut masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Program, KUD, Kesejahteraan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Koperasi hadir ditengah-tengah masyarakat dengan mengemban tugas dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan dari para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang diderita mereka¹

Sebagai badan usaha rakyat, koperasi perlu membangun diri dan meningkatkan diri, serta mampu bersaing dengan badan usaha lain berdasarkan prinsip koperasi, sehingga diharapkan, koperasi sebagai badan usaha rakyat mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional yang berfungsi memperkuat perekonomian rakyat, dan membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Koperasi Unit Desa Hila merupakan satu-satunya koperasi Desa yang menyalurkan atau menyediakan sarana produksi di bidang pertanian (alat garap, pupuk dan bibit tanaman) dan nelayan (perahu, alat tangkap ikan, dan mesin Yamaha pentura) dibidang Unit simpan pinjam, yaitu (berupa uang permodalan dana bergulir pada anggota masyarakat) menyediakan Pengolahan atau pemasaran hasil rempah yaitu (pala, cengkeh, coklat) menyediakan keperluan barang-barang konsumsi yaitu, (waserda)

Berdasarkan uraian, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti Implementasi Program Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Hila Kecamatan Leihitu Maluku Tengah.

2. Rumusan Pokok Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Koperasi Unit Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa Hila Masyarakat Maluku Tengah?

¹Suyanto. 2007, Koperasi Unit Desa Mekar Unggar dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Berbagai Hambatannya, Universitas Negeri Semarang. Hal. 1

2. Bagaimana Implementasi Program Koperasi Unit Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Hila Kecamatan Leihtu Maluku Tengah?
3. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat Koperasi Unit Desa dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Hila masyarakat Maluku Tengah?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kopeasi

Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana menurut Pachta Andjar, diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakan pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, dan sebagainya.²

a. Pelayanan Koperasi

Menurut Dhea Ayu Richinta GaniaSiwi yang dimaksud dengan pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Yang dimaksud dengan pelayanan dalam koperasi adalah “Penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para anggota untuk mempertahankan kelangsungan hidup atau daya saing perusahaan dan rumah tangganya”.³

b. Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi dan Peran Koperasi menurut Baswir, Secara umum koperasi mempunyai dua fungsi utama penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Fungsi pertama adalah dalam bidang ekonomi, sedangkan fungsi kedua adalah dalam bidang sosial. Fungsi dan peran koperasi dalam bidang ekonomi secara khusus adalah Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperilaku

² Pachta Andjar, dkk. 2012, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta: Kencana. Hal. 19

³ Dhea Ayu Richinta GaniaSiwi. 2015, Pengaruh penting terhadap partisipasi anggota KSP Argo Sumbing Mandiri, yaitu: pendidikan perkoperasian anggotadan pelayanan koperasi pada KSP Arogo Sumbing Mandiri Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung. Universitas Negeri Yogyakarta. Hal. 29

kemanusiaan. Dalam melakukan usahanya, koperasi tidak menjadikan keuntungan sebagai motif utamanya.⁴

2. Peranan Koperasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang dipilih oleh sebagian anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi (rumah tangga) serta kesejahteraan hidupnya. Secara logika sederhana, orang akan memilih Koperasi jika organisasi ekonomi tersebut dirasakan atau diyakini bisa mendatangkan manfaat lebih besar baginya dari pada bentuk organisasi ekonomi lain.

Koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterahkan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Anggota bisa memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam Koperasinya. Semakin sering anggota berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Agar Koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada anggota, maka dapatkan. Agar Koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada anggota, maka Koperasi itu sendiri harus baik kinerjanya. Dalam hal ini, semakin baik kinerja Koperasi, maka semakin besar kemampuan Koperasi mensejahterakan anggotanya. Semakin besar peran Koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan Koperasi.⁵

a. Peran Koperasi dalam Bidang Ekonomi

Pengertian peranan adalah suatu aspek dinamis, hal itu dimanifestasikan melalui adanya kegiatan yang dilakukan. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban-kewajibannya yang didalamnya secara otomatis hak-haknya terlaksana. Dimana teorisosiologi menyebutkan bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.⁶

b. Peran Koperasi dalam Bidang Sosial

Sebagaimana halnya peran koperasi dalam bidang ekonomi, peran koperasi dalam bidang sosial juga sangat erat hubungannya dengan asas dan prinsip-prinsip yang dianutnya. Karena itulah, sebagai mana disinggung

⁴ Revrisond Baswir. 2011, Koperasi Indonesia Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE. Hal. 48-49

⁵ Rahayu Diahastut. 2011, Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Assalam, Universitas Negeri Semarang. Hal. 11

⁶ Lailia Rosita. 2008. Upaya KUD Rambang Sari Jaya dalam Pengembangan Masyarakat Tani Melalui Simpan Pinjam di Desa Karya. FD-UIN Kalijaga Yogyakarta. Hal. 29

diatas, peran ekonomi dan peran sosial Koperasi pada dasarnya saling berkaitan satu sama lain. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama.⁷

c. Mekanisme Simpan Pinjaman di Koperasi

Koperasi Kegiatan yang diadakan oleh Koperasi Unit Desa Hila adalah program-program yang telah disosialisasikan pada masyarakat dalam memberdayakan ekonomi, yaitu mengenai simpan pinjam. Adapun program kegiatan pemberdayaan itu meliputi:

1. Kredit

Pada dasarnya pemberian kredit yang diberikan oleh koperasi kepada masyarakat, sesungguhnya berdasarkan pada kepercayaan sehingga kaitannya dengan kegiatan usaha bagi koperasi dan masyarakat terjalin rasa saling percaya, dan tidak kalah pentingnya adanya familial atau kekeluargaan antara koperasi dan masyarakat, sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah.

2. Administrasi Kredit

Administrasi perkreditan Koperasi Unit Desa Hila adalah suatu proses persyaratan pengumpulan informasi, penguasaan dokumen yang berkaitan dengan proses kegiatan perkreditan. Dalam pengadaan administrasi perkreditan, koperasi memperhatikan unsur-unsur yang terkait agar administrasi dapat terselenggara dengan baik dan benar.⁸

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata kata.

⁷ Undang-undang pasal 3 UU No. 25/1992

⁸ Lailia Rosita. 2008. Upaya KUD Rambang Sari Jaya dalam Pengembangan Masyarakat Tani Melalui Simpan Pinjam di Desa Karya. FD-UIN Kalijaga Yogyakarta. Hal. 31

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.⁹

Jenis Pendekatan Penelitian Deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu.¹⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam melakukan analisis data dan pengolahan data maka digunakan beberapa metode dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti melihat secara langsung keadaan dan suasana kegiatan di Koperasi Unit Desa Hila. Dengan pengamatan ini diharapkan dapat melengkapi data dari wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan arsip-arsip, buku-buku, majalah, sebagai bukti yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambar kegiatan usaha di Koperasi Unit Desa Hila.

Penggunaan foto sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi yang bertujuan untuk mengabadikan peristiwa yang terjadi di lapangan yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi foto tersebut didapatkan dari foto pribadi yang menggambarkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Koperasi Unit Desa Hila

3. Metode Analisis Data

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif. Ketiga kegiatan dalam analisis data kualitatif yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data

⁹ Setyosari, Punaji. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP. Hal. 15

¹⁰ Hidayat Syah. 2010. *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*. Pekanbaru: Suska Pres. Hal. 10

Penulis menggunakan reduksi data untuk memilih data-data yang sudah terkumpul yang sesuai dengan fokus penelitian kemudian data disaring sesuai dengan fokus penelitian.

2. Pengolahan data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat terwujud sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

3. Verifikasi atau kesimpulan data

Kesimpulan atau verifikasi data didasarkan pada reduksi dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Penarikan kesimpulan harus didasarkan pada semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian dan dapat menjawab dari semua permasalahan yang ada.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan

1. Peran KUD Desa Hila Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Koperasi merupakan salah bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal Indonesia dan koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama.¹¹

Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Jadi di dalam koperasi setiap anggota mempunyai kedudukan yang sama dan peran yang sama dalam kegiatan koperasi.¹²

Pentingnya peranan karena ia mengatur perilaku seseorang, meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Dalam hubungan ini peranan-peranan mencakup tiga hal yaitu;

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

¹¹ Kasmir. 2012. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 269-270

¹² G. Karta Sapoetra dkk. 2003, Koperasi Indonesia, Jakarta: Rineka Jaya. Hal. 1

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan individu.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur social masyarakat

2. Upaya KUD Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hila

1. Kontribusi Koperasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hila

Di dalam kehidupan Masyarakat Desa Hila, kebutuhan dapat bersifat individu maupun kolektif. Konsekuensinya, selalu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan dapat dibedakan dalam berbagai kriteria, baik dilihat dari sifat, hierarki, maupun prioritasnya. Terpenuhinya kebutuhan pada prioritas pertama atau kebutuhan dasar akan mendorong usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhan pada prioritas berikutnya. Usaha pemenuhan kebutuhan tidak pernah berhenti.

Koperasi Unit Desa Hila anggota dapat meningkat. Pada umumnya Koperasi Unit Desa Hila ini bekerjasama Perusahaan Air Minum (PAM), Dishub (Pelabuhan Mini Antar Pulau), Dinas Koperasi UMKM, Pemda Maluku Tengah. Kerjasama ini merupakan salah satu cara Koperasi Koperasi Unit Desa Hila untuk mengembangkan programnya.

2. Kontribusi KUD dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hila

Peran Koperasi Unit Desa Hila dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Hila antara lain sebagai berikut:

1) Menjalin kemitraan atau kerjasama

Koperasi Unit Desa Hila ini telah menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan baik instansi pemerintah maupun swasta untuk mewujudkan tujuan Koperasi Unit Desa Hila yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2) Membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat

Keberadaan Koperasi Unit Desa Hila ini selain dapat meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Hila, karena dengan berkembangnya usaha-usaha baru yang dikelola oleh Koperasi Unit Desa Hila ini dapat mengurangi pengangguran. Masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa Hila maupun tidak sangat membutuhkan menjadi anggota Koperasi Unit Desa Hila

3. Impementasi Program KUD Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

a. Program Bidang Kelompok Tani

Program Koperasi Unit Desa Hila sangat berperan penting dalam masyarakat, dengan adanya kegiatan program Koperasi Unit Desa untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat tersebut masyarakat bisa berdaya dan bisa memiliki kemampuan untuk mengolah alam sekitarnya menjadi hal yang berguna.

b. Program KUD Di Bidang Kelompok Nelayan

Upaya yang dilakukan Koperasi Unit Desa untuk meningkatkan produktifitas usaha penangkapan di lepas pantai Desa Hila, Kelompok Nelayan Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah disekitarnya melakukan usahanya dengsn cara Tradisional peralatan seadanya. Sedangkan kebutuhan konsumsi terus meningkat seiring dengan perkembangan penduduk dan kesadaran masyarakat Desa Hila gizi keluarga.

c. Program KUD Usaha Di Bidang Ekonomi.

Dengan terdesaknya kebutuhan anggota yang bermacam-macam, maka mendorong Koperasi Unit Desa Hila untuk dapat menjalankan usahanya dalam bidang ekonomi. Berikut ini usaha yang dijalankan oleh Koperasi Unit Desa Hila dalam bidang ekonomi

4. Problematika Peningkatan Kesejahteraan Melalui KUD Hila

Setelah mengkaji secara mendalam tentang konstribusi peningkatkan kesejahteraan masyarakat di temukan beberapa kekuatan untuk mendorong terlaksananya serta kelemahan yang harus diantisipasi oleh Koperasi Unit Desa Hila dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian program Koperasi Unit Desa sangat penting dalam usaha mencapai tujuan yang telah diprogramkan sebelumnya sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan yang dialami.

Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan dana dari pusat yang kemudian dipinjamkan kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi mereka, dan biasanya pinjaman itu diberikan pada kepada ibu-ibu rumah tangga yang berkeinginan untuk membuka usaha kecil atau menengah, yang dikembalikan setiap bulannya dengan cara mengangsur. Selain Program Pemberdayaan

Masyarakat, Desa Hila juga memberikan dana pembinaan kesejahteraan Keluarga, yang disebut dengan UPPKS atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.

Dari kenyataan di lapangan, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Koperasi Pondok Pesantren Assalaam, diantaranya adalah sebagai berikut ini:

1. Faktor Pendorong

- a. Peluang kerja yang di berikan oleh Koperasi Unit Desa Hila disambut baik oleh masyarakat.
- b. Adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi anggota.
- c. Anggota merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Koperasi Unit Desa Hila dalam pemenuhan kebutuhan.

2. Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi kendala dan hambatan Implementasi Program KUD Hila Kesejahteraan masyarakat adalah faktor penting dalam peningkatan mutu suatu daerah atau Desa, namun terkadang ada banyak faktor yang mempengaruhi mengapa pemerintah masih kurang dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, dalam kasus ini Desa Hila kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya disebabkan oleh beberapa Faktor berikut ini:

- a. Kurangnya partisipasi dan antusiasme masyarakat
- b. Terbatasnya Modal dalam peminjaman kredit
- c. Kurangnya Modal

B. Hasil Pembahasan

Implementasi Program Koperasi Unit Desa Hila dalam Bidang Usaha kecil dan pemberdayaan masyarakat atau kelompok demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dalam bab empat ini, penulis menganalisa hasil dari temuan lapangan yang sebelumnya telah dijelaskan. Pada bagian ini penulis menguraikan analisis terhadap berbagai hasil penelitian, baik mengenai data dan informasi yang diperoleh melalui studi dokumentasi, penelitian, maupun melalui wawancara mendalam.

Analisis yang dilakukan dalam bab ini menggunakan pendekatan Model Evaluasi Sistem Analisis (System Analisis Evaluation Model) yang meliputi: masukan (Inputs), Proses (Process), Keluaran (Output)

1. Indikator Masukan (Inputs)

Indikator masukan (Inputs) akan mengidentifikasi sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan keluaran. Indikator input mengukur jumlah sumber daya seperti: ketersediaan dana, ketersediaan SDM atau petugas, ketersediaan informasi masyarakat miskin, ketersediaan bantuan modal usaha, dan ketersediaan panduan teknis.

Adapun fungsi dari pendampingan tersebut akan menanyakan atau berdiskusi apakah ada permasalahan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Hila atau tidak, memberikan solusi pada suatu masalah yang sedang dihadapi, memberikan bimbingan dan motivasi dalam peningkatan usaha, dan menjadi penghubung KUD dengan pihak lainnya.

2. Indikator Proses (Process)

Indikator proses membahas permasalahan program KUD Hila seperti: apakah sosialisasi program dilakukan dengan baik, Apakah bantuan yang diberikan sudah relevan dengan jenis usaha yang ditekuni oleh KUD Hila, apakah ada pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh anggota masyarakat.

Koperasi Unit Desa merupakan koperasi di wilayah pedesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian, usaha kecil. Koperasi Unit Desa dapat juga dikatakan sebagai wadah organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri.

3. Indikator Keluaran (Output)

Indikator output digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan oleh suatu program. Dengan membandingkan keluaran dan sasaran program kegiatan, dapat diketahui apakah kemajuan pelaksanaan dan pencapaian program kegiatan tersebut sesuai dengan rencana. Indikator output hanya dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan sesuatu program kegiatan apabila indikator ini dikaitkan dengan sasaran program kegiatan yang didefinisikan secara jelas dan terukur.

Di dalam indikator keluaran (output) terdapat hal-hal yang harus dicapai seperti: terlaksananya program KUD Hila, terlaksananya, terlaksananya bantuan sosial. Pada indikator ini program Koperasi Unit Desa terlaksana secara tidak menyeluruh.

Arifin Sitio menyebutkan tentang prinsip-prinsip koperasi mengenai pendidikan perkoperasian dijelaskan bahwa keberhasilan suatu koperasi sangat bergantung erat dengan partisipasi anggota dan masyarakat. Pandangan Arifin Sitio sudah sejalan dengan hambatan yang dihadapi oleh KUD Desa Hila yaitu kurang partisipasinya anggota masyarakat, dimana masih terdapat beberapa anggota yang belum memanfaatkan jasa-jasa yang ada di koperasi.¹³

Indikator kesejahteraan masyarakat Desa Hila dapat dilihat dari Jumlah pendapatan, pasilitas rumah tangga, kemudahan mendapatkan yalanan kesehatan, dan biaya pendidikan anak bisa di jangkau Melalui program Kopersi Unit Desa Hila yang memberikan modal awal dan modal mengembangkan usaha kecil kepada masyarakat Desa Hila sehingga semuanya bisa di jangkau.

1. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya yang terdapat di masyarakat Desa Hila.
 - a. Jumlah pendapatan Ibu Rumah Tangga semakain meningkat dengan adanya modal menerus dan mengembangkan usaha kecil dari program Koperiasi Unit Desa Hila
 - b. Memberi pasilitas alat bertani kepada kelompok tani, Jumlah hasil usaha kelompok tani meningkat dan hasil tanaman semaking bagus, pasilitas semuanya yang diberikan oleh Koperasi Unit Desa Hila, mulai dari Alat mencangkul dan bibit tanama jangka panjang dan jangka pendek
 - c. Memberikan alat tangkap ikan nelayan, Pendapat kelompok nelayan meningkat begitu banyak, tangkapan ikan laut yang banyak, dan pasaran ikan yang begitu mahal, dan tingkat jumlah pendapan dan polah hidup mereka semakin meningkat
2. Jangkauan Fasilitas tempat tinggal masyarakat Desa Hila, yaitu;
 - a. Penerangan bisa terjangkau ,
 - b. Bahan bakar untuk memasak,
 - c. Sumber air minum,
3. Kemudahan mendapatkan pelayanan masyarakat kesehatan terdiri dari 6 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan.

¹³ Sitio, Arifin, dkk. 2001. Koperasi Teori Dan Praktik. Jakarta : Erlangga. Hal. 30

4. Biaya sekolah anak sudah bisa di jangkat deari hasil pendapat usaha sendiri yang di berikan modal awal oleh Koperasi Unit Desa Hila. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

1. Peranan KUD Desa Hila dalam meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat sangat penting dan membantu dalam berbagai kebutuhan anggota masyarakatnya seperti: pemberian pinjaman untuk kebutuhan sekolah, pemberian pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Koperasi tersebut dapat membantu para anggotanya untuk menaggulangi ekonomi umat/anggotanya.
2. Program KUD Desa Hila dalam meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat yaitu dengan:
 - a. Program KUD Di Bidang Kelompok Nelayan
 - b. Program KUD Usaha Di Bidang Ekonomi.
 - c. Program Usaha Bidang Sosial
 - d. Program Bantuan KUD Untuk Meningkatkan Kesejahteraan
 - e. Program Bidang Kelompok Tani
3. Upaya yang dilakukan Koperasi Unit Desa Desa Hila dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, mengenai:
 - a. Kurangnya Modal yaitu dengan cara pemupukan modal
Adanya Kredit Macet, yaitu dengan cara:
 1. Penghapusan pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah
 2. Apabila ada anggota yang meninggal dunia tetapi masih mempunyai hutang, maka akan dimerahkan atau dihapus
 3. Pemotongan Sisa Hasil Usaha sesuai dengan yang disepakati
 4. Apabila ada anggota yang keluar tetapi masih mempunyai pinjaman pada KUD Desa Hila, maka pengurus akan membentuk tim yang akan ditugaskan untuk menagih kerumahnya.
 - b. Masih rendahnya kemajuan anggota masyarakat, yaitu dengan cara memberikan penyuluhan mengenai perkoperasian, khususnya mengenai pentingnya peranan anggota masyarakat di dalam sebuah koperasi. Karena fungsi anggota yaitu pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi

DAFTAR PUSTAKA

Dhea Ayu Richinta GaniaSiwi. 2015, Pengaruh penting terhadap partisipasi anggota KSP Argo Sumbing Mandiri, yaitu: pendidikan perkoperasian anggotadan pelayanan koperasi pada KSP Argo Sumbing Mandiri Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung. Universitas Negeri Yogyakarta.

G. Karta Sapetra dkk. 2003, Koperasi Indonesia, Jakarta: Rineka Jaya.

Hidayat Syah. 2010. *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*. Pekanbaru: Suska Pres.

Kasmir. 2012. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lailia Rosita. 2008. Upaya KUD Rambang Sari Jaya dalam Pengembangan Masyarakat Tani Melalui Simpan Pinjam di Desa Karya. FD-UIN Kalijaga Yogyakarta.

Pachta Andjar, dkk. 2012, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta: Kencana.

Revrisond Baswir. 2011, Koperasi Indonesia Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.

Rahayu Diahastut. 2011, Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Suyanto. 2007, Koperasi Unit Desa Mekar Unggar dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Berbagai Hambatannya, Universitas Negeri Semarang. Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Assalam, Universitas Negeri Semarang

Sitio, Arifin, dkk. 2001. Koperasi Teori Dan Praktik. Jakarta : Erlangga.

Setyosari, Punaji. 2012. Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan. Jakarta:

KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.

-----Undang-undang pasal 3 UU No. 25/1992

-----Koperasi Unit Desa Hila Tahun 2011-2015.

**PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI,
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**Julianti LB. Mossy & Abdul Latif L. Arsyad¹**ABSTRACT**

Developing countries are faced with conditions of development inequality and injustice. Developed economics not only requires an appropriate, efficient and equitable way, but there must also be a recipe for changing inequality evenly. It must be admitted that economic growth also contributed a lot in creating economic miracles. The power of economic growth to transform society from poverty to prosperity is a reason.

Therefore, an intelligent instrument is needed to overcome the problems of inequality and injustice faced. Islamic economics is present as an instrument of solution. Not an alternative, as discussed. Economic growth jika studied in Islamic economics is the optimal growth, in terms of both material and spiritual prosperity. Islamic economics does not allow consumption of capital and growth that exceeds limits which imposes unnatural sacrifices on humans. So according to Sharia Economy a low growth rate accompanied by an even distribution of income would be better than a high growth rate but not accompanied by an equitable distribution.

Keyword: Growth, Equity, Sharia Economy

ABSTRAK

Negara berkembang diperhadapkan dengan kondisi ketidakmerataan dan ketidakadilan pembangunan. Ekonomi yang dikembangkan tidak hanya membutuhkan cara yang tepat, efisien dan berkeadilan, tapi juga harus ada resep untuk mengubah ketidakmerataan menjadi merata. Harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi juga banyak memberikan kontribusi dalam menciptakan keajaiban-keajaiban ekonomi. Kekuatan pertumbuhan ekonomi untuk mentransformasi masyarakat dari kemiskinan menuju kemakmuran menjadi suatu alasan.

Olehnya itu dibutuhkan suatu instrumen cerdas guna mengatasi masalah ketidakmerataan dan ketidakadilan yang dihadapi. Ekonomi syariah hadir sebagai instrumen solusi. Bukan alternatif, sebagaimana diwacanakan. Pertumbuhan ekonomi menurut Islam adalah pertumbuhan yang optimal, baik dari segi kesejahteraan materi maupun rohani. Islam tidak memperkenankan konsumsi modal dan pertumbuhan yang melampaui batas yang memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah bagi manusia. Jadi menurut Islam tingkat pertumbuhan yang rendah yang diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata akan lebih baik daripada tingkat pertumbuhan yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan distribusi yang merata.

Keyword : Pertumbuhan, Pemerataan, Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Dalam Ekonomi Pembangunan, kajian mengenai pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menempati posisi yang cukup penting di kalangan para ekonom. Kajian ini setidaknya dimulai ketika ekonom mengamati fenomena-fenomena penting yang dialami dunia dalam dua abad belakangan ini. Perkembangan perekonomian dunia selama dua abad ini telah menimbulkan dua efek yang sangat penting, yaitu : *pertama*, kemakmuran atau taraf hidup yang semakin

¹ Mahasiswa Tingkat Akhir Prodi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

meningkat yang dicapai oleh masyarakat dunia, *kedua*, terciptanya kesempatan kerja baru kepada penduduk yang semakin bertambah jumlahnya.

Ekonomi pembangunan pada dasarnya telah melewati tiga fase yang berbeda.² Fase *pertama*, adalah Ekonomi Pembangunan klasik yang dikembangkan oleh para ekonom klasik yang mencoba menjelaskan ekonomi jangka panjang dalam kerangka kerja kapitalisme dengan slogannya yang terkenal *laissez faire*. Fase ini bertahan lebih kurang satu abad sejak publikasi *The Wealth of Nation*, karya Adam Smith tahun 1776.³ Fase *kedua*, dimulai setelah perang dunia kedua dan ketika sejumlah negara dunia ketiga memperoleh kemerdekaannya. Oleh karena banyak negara-negara yang baru merdeka, maka analisis masalah yang berkenaan dengan negara-negara tersebut mulai menarik perhatian.⁴ Pada fase ini fokus perhatian berpindah dari ekonomi liberalisme klasik kepada Neo Klasik. Strategi yang dipegang adalah ketergantungan yang lebih kecil kepada pasar dan peranan yang lebih besar dari pemerintah dalam perekonomian. Kapitalisme *laissez faire* telah kehilangan peran ketika itu, akibat peristiwa Great Depression (1929-1932).⁵ Ekonom yang sangat berperan dalam fase ini adalah John Maynard Keynes dengan bukunya *The General Theory of Employment, Interest and Money* yang diterbitkan tahun 1936.⁶ Pada fase inilah ekonomi Keynesys dan sosialis memperoleh momentum di dunia Barat. Sedangkan fase *ketiga* memiliki fokus yang berbeda dengan fase kedua. Dalam fase ketiga ini perhatian Ekonomi Pembangunan cenderung anti kekuasaan (negara) dan kembali pro kepada kebebasan pasar. Fase ini terjadi mulai tahun 1970-an, yaitu ketika pelaksanaan strategi Keynes dan sosialis mulai melemah. Pada fase ini ekonomi neoklasik mulai "comeback" dan menjadi paradigma yang dominan. Mereka berkeyakinan bahwa liberalisasi pasar dengan pengurangan peran pemerintah dalam bidang ekonomi adalah sangat penting untuk menyelesaikan masalah

² M.Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, (USA: The Internasional Institute of Islamic Thought (IIIT), 1992), h. 15

³ Michael P.Todaro, *Economic Development in The Third World*, (New York: London, Longman 1989), p.7

⁴ E.E.Hegen, *On The Theory of Social Change*, (1992), 36. lihat juga H.W.Arndt, *Development Economic Before 1945, 1972*), h. 13-29.

⁵ *Great Depression* (Depresi besar) merupakan priode kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Puncak kemerosotan tersebut ditandai oleh meningkatnya angka pengangguran. Saat itu ¼ tenaga kerja Amerika Serikat tidak memiliki pekerjaan (*unemployment*). Kemerosotan yang sangat tajam juga dialami oleh Pendapatan Nasional Amerika Serikat. Kemunduran ekonomi yang serius itu merebak ke seluruh dunia, baik ke negara-negara industri maupun negara-negara miskin. Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Edisi II, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999), h. 413-414.

⁶ Keynes adalah ekonom terkemuka dari Universitas Cambridge. Ia dianggap sebagai ekonom yang mampu melahirkan pikiran-pikiran baru yang tidak dicetuskan oleh pendahulunya. Saat itu ada dua permasalahan yang muncul setelah depresi yang dialami oleh Amerika Serikat, yaitu teori tentang uang dan apa yang harus diusahakan oleh negara untuk mengurangi pengangguran. Keynes dianggap memiliki ulasan teoritis yang paling sistimatis dan komprehensif. (Lijjat George Soule, *Idea of the Great Economist*, terj, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, (Jakarta: Kanisius, 1994), h. 112.

negara berkembang. Fase ini juga dianggap sebagai era kebangkitan liberalisme dan ekonomi neoklasik.⁷

Ketiga fase tersebut, menunjukkan inkonsistensi dan ketidakpastian dalam program pembangunan di negara-negara berkembang,⁸ khususnya di negara-negara muslim. Inkonsisten tersebut melahirkan analisis dan resep kebijakan yang bertentangan dan ini sangat membahayakan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang yang hendak melaksanakan pembangunan dengan model Barat mengalami kebingungan karena pertentangan-pertentangan konsep antara neo klasik ala Keynes dengan liberalisme klasik (ekonomi pasar yang mereduksi peran negara dalam ekonomi) yang diajarkan Adam Smith. Kebingungan negara-negara berkembang itu juga dipengaruhi oleh konsep-konsep pembangunan dari negara-negara yang menerapkan sistem sosialis.

Karena itu, maka tugas yang dihadapi negara berkembang sangat rumit. Mereka tidak hanya harus mengembangkan ekonomi dengan cara yang tepat dengan tingkat efisien dan keadilan yang tinggi dalam penggunaan sumberdaya, tetapi juga harus mengubah ketidakmerataan pembangunan yang ditimbulkan oleh resep yang salah itu menjadi merata.

Walau demikian, harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang telah berlangsung beberapa waktu lalu dan sampai saat ini berlangsung, juga banyak memberikan kontribusi dalam menciptakan keajaiban-keajaiban ekonomi. Kekuatan pertumbuhan ekonomi untuk mentransformasi masyarakat dari kemiskinan menuju kemakmuran menjadi suatu alasan.

Pernyataan di atas, tidak harus menggembirakan kita. Justru kita harus memberikan perhatian terhadap kenyataan-kenyataan tragis yang ditemukan. Memang bisa saja dikemukakan argumen bahwa seiring dengan perjalanan waktu dan semakin meningkatnya pertumbuhan, kekurangan-kekurangan itu akan bisa dihilangkan. Akan tetapi hal demikian tidak sesuai fakta lapangan, sebab kalau memang demikian, maka negara-negara industri pasti akan terbebas dari masalah-masalah seperti itu. Pada kenyataannya dewasa ini lebih dari 100 juta orang di negara-negara industri hidup di bawah garis kemiskinan dan lebih dari lima juta orang menjadi tunawisma.⁹

Perekonomian global masih terus mengalami ketidakpastian, bersumber dari normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS), risiko keamanan dan geopolitik, ketegangan di Timur

⁷ M.Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, The International Institute of Islamic Thought, (IIIT), USA, 1992. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Edisi Indonesia, (Jakarta: Risalah Gusti, 1999), h. 160

⁸ Negara berkembang memiliki karakteristik antara lain, taraf hidup yang rendah, produktifitas yang rendah, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan ketergantungan pada ekspor hasil-hasil pertanian (lihat, Ace Pce Pertadireja, *Pengantar Ekonomika*, (Yogyakarta : BPFE, 1984), h. 213-219.

⁹ Anwar Ibrahim, *The Asia Renaissance*, terj Ihsan Ali fauzi, Renaisans Asia, (Bandung, Mizan, 1998), h. 80-81

Tengah, Turki, dan Korea Utara, dampak Brexit, serta moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, yang mempengaruhi kinerja perdagangan internasional.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah Indonesia terus berupaya melaksanakan program pembangunan dan Nawa Cita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia. Tingkat inflasi mencapai 3,02%, menurun dibandingkan tingkat inflasi di 2015 sebesar 3,35%. Angka inflasi ini merupakan inflasi tahunan terendah sejak 2010. Tingkat pengangguran mencapai 5,6%, menurun dibandingkan 2015 sebesar 6,2%. Tingkat kemiskinan mencapai 10,7%, menurun dibandingkan 2015 sebesar 11,2%. Nilai tukar rupiah atas dolar AS di 2016 menguat pada kisaran Rp13.307/US\$ di tengah kecenderungan penguatan dolar AS. karena keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan terpilihnya Presiden Amerika Serikat.¹⁰

Dalam mengelola perekonomian dihadapkan pada situasi global yang dinamis dan aspirasi masyarakat yang terus meningkat, pemerintah menggunakan seluruh instrumen kebijakan agar kinerja perekonomian terus membaik dan fundamental ekonomi nasional dapat diperkuat. Kebijakan fiskal melalui APBN merupakan instrumen pengelolaan ekonomi yang sangat penting melalui fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi. Paket-paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan Pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta memerangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan.

Sementara laporan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2019. Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,85 persen pada Maret 2019.¹¹

Dibanding September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019). Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019).

¹⁰ <http://www//detik.com/detik.financial>. Terbitan 5 Pebruari 2018

¹¹ Badan Pusat Statistik, 2020.

Garis Kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp313.232,- (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp112.018,- (26,34 persen). Pada Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan.

BPS mencatat tujuh faktor sebagai pendorong utama penurunan tingkat kemiskinan tersebut. Faktor pertama yang mendorong turunnya kemiskinan di Indonesia ialah naiknya rata-rata upah riil buruh per hari. Rata-rata upah riil buruh tani per hari pada Maret 2019 naik 0,93 persen dibanding September 2018. Sementara rata-rata upah riil buruh bangunan per hari pada Maret 2019 naik 0,76 persen dibanding September 2018. Selain itu, faktor lainnya yang mendorong turunnya kemiskinan adalah indeks nilai tukar petani yang selalu berada di atas 100. Nilai tukar petani ini menunjukkan nilai tukar antara pendapatan rumah tangga pertanian dan konsumsi. Nilai tukar petani pada Januari 2019 sebesar 103,33, Februari sebesar 102,94, dan Maret 102,73. Faktor ketiga penyebab turunnya kemiskinan adalah tingkat pengangguran terbuka pada Februari yang sebesar 5,01 persen turun 0,33 persen dari Agustus 2018 dan 0,12 persen dari Februari 2018. Faktor keempat adalah inflasi umum yang cukup rendah selama periode September 2018-Maret 2019 sebesar 1,52 persen. Selanjutnya, adanya penurunan harga eceran beberapa komoditas pada periode September 2018-Maret 2019 juga menjadi faktor pendorong turunnya kemiskinan di Indonesia. Pada periode tersebut, harga daging ayam ras turun 1,85 persen, minyak goreng turun 2,12 persen, gula pasir turun 1,22 persen, cabai rawit turun 11,21 persen, dan cabai merah turun 10,35 persen. Lebih lanjut, faktor keenam pendorong turunnya kemiskinan adalah pelaksanaan program beras sejahtera (Rastra) sudah sesuai jadwal. Menurut data Perum Bulog, realisasi distribusi program Rastra pada Januari sebesar 99,47 persen, Februari 98,8 persen, dan Maret 98,5 persen. Terdapat peningkatan cakupan penerimaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang terealisasi pada triwulan I 2019 yang mencapai 219 kabupaten/kota, bertambah 61 kabupaten/kota dibanding triwulan III 2018. Faktor ketujuh pendorong berkurangnya kemiskinan adalah rata-rata pengeluaran per kapita pada Desil atau kelompok 1 mengalami peningkatan. Menurut desil pengeluaran per kapita per bulan, rata-rata pengeluaran per kapita pada kelompok penduduk Desil/kelompok 1 periode September 2018-Maret 2019 mengalami peningkatan sebesar

4,32 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan garis kemiskinan pada periode tersebut yang sebesar 3,55 persen.¹²

Namun angka ini tetap belum menggambarkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jurang pemisah antara Barat dan Timur masih terlihat nyata. Memang, Indonesia termasuk negara berkembang yang menikmati pertumbuhan ekonomi positif sejak tiga tahun terakhir.

Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15 833,9 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp59,1 Juta atau US\$4 174,9. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,62 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2019 dibanding triwulan IV-2018 tumbuh 4,97 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,78 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,97 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2019 dibanding triwulan III-2019 mengalami kontraksi sebesar 1,74 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami penurunan 20,52 persen. Dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55 persen. Sementara struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 59,00 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32 persen, dan Pulau Kalimantan 8,05 persen.¹³ Itu artinya masih ada ketidakmerataan dan ketidakadilan pembangunan ekonomi Indonesia, dimana posisi wilayah timur Indonesia selalu berada pada garis pertumbuhan paling bawah.

Meski perekonomian Indonesia 2019 mengalami perlambatan, produk domestik bruto (PDB) per kapita justru Indonesia mengalami peningkatan. Pada 2019, PDB per kapita Indonesia mencapai Rp 59,1 juta atau setara dengan US\$ 4.174,9. Angka ini meningkat 5,5% dibandingkan

¹² Badan Pusat Statistik, 2020. Lihat juga, <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/7-faktor-pendorong-turunnya-kemiskinan-di-indonesia-versi-bps/1531931>

¹³ Badan Pusat Statistik 2020, “*Ekonomi Indonesia 2019 Tumbuh 5,02 Persen*”. Lihat, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html>

dengan 2018 yang sebesar Rp 56 juta dan 2017 yang sebesar Rp 51,89 juta.¹⁴ Bila dihitung kasar, rata-rata pendapatan orang Indonesia adalah Rp4 juta per bulan. Sepintas data ini menampilkan seolah-olah semua orang Indonesia hidup berkecukupan dengan pendapatan Rp4 juta per bulan. Namun jika ditelusuri secara lebih detil, fakta di lapangan berbanding terbalik. Masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar.

Disisi lain, rasio gini¹⁵ Indonesia sebagaimana dikeluarkan Badan Pusat Statistik juga menunjukkan perbandingan yang cukup lebar antara si kaya dan si miskin. Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2019 yang sebesar 0,382 dan menurun 0,004 poin dibandingkan dengan rasio gini September 2018 yang sebesar 0,384. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, rasio gini di daerah perkotaan pada September 2019 tercatat sebesar 0,391. Angka ini jauh dari angka 1, namun rasio gini tersebut cukup memberikan isyarat bahwa ada kesenjangan. Ketimpangan ekonomi Indonesia merupakan yang ke-empat di dunia, dimana 49,3 persen ekonomi nasional dikuasi oleh satu persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Fakta lain tentang kesenjangan atau ketidakmerataan pembangunan ekonomi di Indonesia ditunjukkan dengan struktur perekonomian yang tak seimbang antara pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia.¹⁶

Dalam ilmu ekonomi, kondisi ini bertolak belakang dengan asumsi-asumsi *ceteris paribus*. Dalam konteks ini, menurut Keynes, “Kita terkungkung dan kehabisan energi dalam perangkap teori dan implementasi ilmu ekonomi kapitalis yang ternyata tetap saja mandul untuk melakukan terobosan mendasar guna mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup umat manusia di muka bumi ini”¹⁷.

Kesimpulannya, konsep dan kebijakan ekonomi yang berdasarkan kapitalisme dan sosialisme, terbukti telah gagal mewujudkan perekonomian yang berkeadilan.¹⁸ Akibat berpegang paham kapitalis dan sosialis, maka terjadi ketidakseimbangan makroekonomi dan instabilitas nasional.

¹⁴ Harian.analisadaily.com/mobile/opini/news/kesenjangan_pendapatan_per_kapita_Indonesia. Terbitan 18 Maret 2018.

¹⁵ Rasio Gini merupakan alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Jika A=0 koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika B=0 koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Kamus Ekonomi.financial.bisnis.com.

¹⁶ Badan Pusat Statistik, 2018

¹⁷ M.Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge, Ibid*. Lihat juga, Fernando Cardim de Carvalho, “Keynes and the reform of the capitalist social order”. *Journal of Post Keynesian Economics/Winter*, Vol. 31, No. 2, (2008), h. 194. Keynes percaya bahwa, Kapitalisme dapat dihilangkan, dengan menunjukkan output yang dapat disimpan secara permanen di level yang lebih tinggi dari apa diketahui kemudian, memperbaiki kondisi kehidupan semua orang atau memungkinkan meningkatnya pendapatan untuk kelompok sosial tertentu tanpa harus mengurangi pendapatan nyata grup lain. Bahkan, dia yakin ekonomi bisa mempertahankan kondisi booming, mendorong investasi ke titik di mana kelangkaan modal bisa hilang dan, secara teknis, kapitalisme seperti itu dapat dibuang

¹⁸ *Ibid*

Dengan melihat realita di atas, jelas ada "*something wrong*" dalam konsep-konsep yang selama ini diterapkan di berbagai negara, karena kelihatan masih jauh dari yang diharapkan. Konsep-konsep tersebut terlihat tidak memiliki kontribusi yang cukup signifikan, bahkan bagi negara-negara pencetus konsep tersebut. Ini terbukti dari ketidakmampuan direalisasikan sasaran-sasaran yang diinginkan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kesempatan kerja penuh (*full employment*) dan distribusi pendapatan dan kekayaan merata.¹⁹

Sistem kapitalis dan sosialis ekonomi selama ini jelas tidak sesuai dengan sistem nilai Islam. Keduanya lebih bersifat eksploitatif dan tidak adil serta memperlakukan manusia bukan sebagai manusia. Kedua sistem itu juga tidak mampu menjawab tantangan ekonomi, politik, sosial dan moral di zaman sekarang. Hal ini bukan saja dikarenakan ada perbedaan ideologis, sikap moral dan kerangka sosial politik, tetapi juga karena alasan-alasan yang lebih bersifat ekonomis duniawi, perbedaan sumberdaya, situasi ekonomi internasional yang berubah, tingkat ekonomi masing-masing dan biaya sosial ekonomi pembangunan yang tinggi (*high cost econom*)²⁰.

Ilmu Ekonomi Pembangunan sekarang ini menghadapi masa krisis dan *re-evaluasi*. Ia menghadapi serangan dari berbagai penjuru. Banyak ekonom dan perencana pembangunan yang skeptis tentang pendekatan utuh ilmu ekonomi pembangunan kontemporer. Menurut Kursyid Ahmad, sebagian mereka berpendapat bahwa teori yang didapat dari pengalaman pembangunan Barat kemudian diterapkan di negara-negara berkembang, jelas tidak sesuai dan merusak masa depan pembangunan itu sendiri.²¹

Pada akhirnya, kita memerlukan suatu konsep pembangunan ekonomi yang tidak hanya mampu merealisasikan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam suatu pembangunan ekonomi secara tepat, teruji dan bisa diterapkan oleh semua negara-negara di belahan bumi ini, tetapi juga yang terpenting adalah kemampuan konsep tersebut meminimalisir atau bahkan menghilangkan segala *negative effect* pembangunan yang dilakukan. Konsep tersebut juga harus mampu memperhatikan sisi kemanusiaan, keadilan dan pemerataan tanpa melupakan aspek moral.

¹⁹ Abdullah Abdul Husein At-Tariqy, *Al-Iqtishad Al-Islami*, Ushuluhi wa Mubaun wa Ahdaf, Dar An-Nafais, (Kuwait, 1999), h. 276.

²⁰ Ekonomi biaya tinggi adalah proses ekonomi di suatu daerah atau negara yang memerlukan atau mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari seharusnya akibat adanya pemberlakuan tarif yang lebih tinggi ataupun pungutan-pungutan liar yang seharusnya tidak ada serta sebagai akibat 'budaya korupsi'. Akibat adanya ekonomi biaya tinggi, maka pada akhirnya ekonomi biaya tinggi tersebut akan dikompensasikan terhadap harga jual barang yang terlibat dalam proses ekonomi tersebut, baik produk yang akan diekspor maupun untuk produk-produk yang berbahan mentah impor maupun lokal, akibatnya output harga produknya menjadi kurang kompetitif dipasaran lokal yang sudah dibanjiri produk impor apalagi jika harus bersaing dipasar internasional. Dapatlah disadari bahwa ekonomi biaya tinggi menyebabkan suatu daerah tidak mampu bersaing dengan daerah lain dalam pembangunan ekonominya. Lihat, Abu Kosim dan Taufiq, "*Ekonomi Biaya Tinggi, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi*", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume. 7, No. 2, (Desember 2009), h. 55. Lihat juga, (<http://www.freelists.org>).

²¹ Umar Capra, *ibid*, h. 25

Kesadaran akan pentingnya nilai moral dalam ekonomi pembangunan telah banyak dikumandangkan oleh para ilmuwan ekonomi. Fritjof Capra dalam bukunya, *"The Turning Point, Science, Society, and The Rising Culture"*, menyatakan, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang paling bergantung pada nilai dan paling normatif di antara ilmu-ilmu lainnya. Model dan teorinya akan selalu didasarkan atas nilai tertentu dan pada pandangan tentang hakekat manusia tertentu, pada seperangkat asumsi yang oleh E. F Schummacher disebut "meta ekonomi" karena hampir tidak pernah dimasukkan secara eksplisit di dalam ekonomi kontemporer.²²

Demikian pula Ervin Laszlo dalam bukunya *3rd Millenium, The Challenge and the Vision* mengungkapkan kekeliruan sejumlah premis ilmu ekonomi, terutama rasionalitas ekonomi yang telah mengabaikan sama sekali nilai-nilai dan moralitas.²³ Menurut mereka kelemahan dan kekeliruan itulah yang antara lain menyebabkan ilmu ekonomi tidak berhasil menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi umat manusia. yang terjadi justru sebaliknya, yaitu ketimpangan yang semakin tajam antara negara-negara berkembang (yang miskin) dengan negara-negara dan masyarakat kaya. Lebih lanjut mereka menegaskan bahwa untuk memperbaiki keadaan tidak ada jalan lain kecuali dengan merubah paradigma dan visi, yaitu melakukan satu titik balik peradaban.

Produksi harus diprioritaskan dari konsumsi, pengeluaran defisit dan hutang nasional yang terlalu besar merupakan hal yang membahayakan bagi masyarakat. Kebijakan yang memacu konsumsi ketimbang tabungan dan menggalakkan hutang merupakan hal yang bisa merusak pertumbuhan ekonomi dan standar hidup masyarakat.

Perencanaan pembangunan ekonomi secara terpusat (*Centrak Planning*) dan totalitarianisme terbukti tidak bisa berfungsi Diperlukan suatu sistem finansial baru untuk menciptakan kerangka kerja finansial yang tanggung dalam meminimalisir inflasi dan ketidakpastian. Harus ada kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan kesejahteraan dengan memberikan kebebasan terjadinya pergerakan modal (*capital movement*) uang dan orang dari satu tempat ke tempat lain.²⁴

Lebih lanjut Mark Skousen, yang terkenal dengan kritik-kritiknya terhadap konsep ekonomi, baik secara mikro maupun makro, menyatakan bahwa ekonomi baru (*new economy*) pasti akan terwujud. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa negara manapun di dunia ini, baik miskin atau kaya, tidak boleh melupakan prinsip-prinsip di atas.²⁵

²² Kursyid Ahmad, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam*, dalam Etika Ekonomi Politik, (Risalah Gusti, Jakarta, 1977). h. 9

²³ Fritjof Capra, *Titik balik Peradaban, Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Budaya*, ter. The Turning Point, Science, Society, The Rising Culture, (Yogyakarta: Yayasan Betang Budaya, 1999, cet,3), h. 246

²⁴ Ervin Laszlo, *Millenium Ketiga, Tantangan dan Visi* (terj. 3rd Millenium The Challenge and Vision, (Jakarta, Dinastindo, Adiperkasa Internasional, 1999), h. 34

²⁵ Mark Skousen, *Economics on Trials : Lies, Myths, and Realities*, (USA Bussiness One Irwin, 1991),

Negara yang mengabaikannya dipastikan akan terus mengalami kegagalan dan menghadapi berbagai masalah, seperti inflasi, deflasi secara tiba-tiba, budget yang tidak seimbang, krisis ekonomi birokrasi yang menakutkan, stagnasi ekonomi, pencemaran lingkungan, perang, dan sebagainya. Sebaliknya, negara yang memperhatikan prinsip-prinsip itu akan mengalami penguatan di berbagai sektor seperti kuatnya nilai mata uang, suku bunga yang rendah, pasar modal yang kuat dan sebagainya.²⁶

Kondisi ini mengharuskan pembangunan ekonomi harus dilihat dalam konteks pemerataan kesejahteraan penduduk. Pemerataan pendapatan ataupun kesejahteraan itulah yang selama ini masih belum bisa dicapai oleh pemerintahan di beberapa negara yang penduduknya menganut mayoritas beragama Islam termasuk Indonesia. Kita juga bisa melihat jurang yang lebar antara masyarakat di wilayah Barat dan wilayah Timur. Sampai kemudian pemerintah Indonesia saat ini, tengah berusaha membangun wilayah Timur dari ketertinggalan pembangunan. Pemerataan pembangunan memang perlu terus dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan sejahtera.

Analisis Kuznets mengenai hubungan pertumbuhan dengan ketidakmerataan ikut mendukung kondisi di atas. Menurut Kuznets dalam masa pertumbuhan akan terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor primer yang produktivitasnya rendah ke sektor industri dan jasa dengan produktivitasnya tinggi. Perbedaan tingkat produktivitas dari kedua sektor ini menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan yang terjadi pada awalnya melebar, kemudian pada masa pertumbuhan akan kembali menyempit.

Dalam artikelnya yang berjudul *"Inequality and Growth Reconsidered: Lesson from East Asia"*, Birdsall et, al., (1995) menolak pandangan kedua teori ketidakmerataan diatas. Justru dengan pemerataan, pertumbuhan yang dicapai bisa lebih tinggi. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan model regresi terhadap delapan negara di Asia Timur (Hongaria, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Taiwan/China dan Thailand). Meskipun selama tiga dasa warsa pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut tinggi, pemerataan pendapatan menjadi semakin baik atau minimal tetap.

Kondisi pertumbuhan dan pemerataan yang tidak seimbang juga mendapat perhatian para ekonom Islam, seperti Abu Yusuf (731-798), Ibnu Rush (1126-1298), Ibnu Khaldun (1332-1404) sampai ke Imam Ghazali (1058-1111). Demikian juga kaum merkantilis, kaum klasik sampai ke Adam Smith (1737-1790), Marx (1818-1883). Sebutan atau istilah pertumbuhan, perkembangan

h. 292

²⁶ Ibid.

dan pembangunan ekonomi sering digunakan secara bergantian, tetapi mempunyai maksud yang sama, terutama pembicaraan mengenai masalah ekonomi.

Mayoritas penulis muslim yakin bahwa nilai-nilai Islam yang ditanamkan kepada generasi muslim melalui pendidikan memiliki peran dominan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Orang pertama yang mengisyaratkan hal ini secara ilmiah dan sistematis adalah Malik bin Nabi dalam karyanya "*al-Muslim fi 'Alam al-Iqtisodi*".²⁷ Dalam karyanya ini Malik bin Nabi menekankan peranan manusia dalam masyarakat muslim sebagai batu fondasi pertama bagi proses pembangunan ekonomi. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat sejumlah penulis kontemporer.

Menurut Abu Yusuf, Islam sarat dengan nilai-nilai yang relevan dengan pembangunan. Nilai-nilai tersebut antara lain tercermin dalam anjuran disiplin waktu, memelihara harta, nilai kerja dan perintah untuk selalu berjamaah, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi dan juga sikap Islam terhadap ilmu pengetahuan.²⁸

Islam melihat pembangunan ekonomi tidak sebatas membangun faktor-faktor produksi, tapi dalam pengertian yang luas, menyeluruh dan substantif dengan menekankan pembangunan insan atau manusia seutuhnya (*human development*). Puncaknya adalah kehidupan yang seindah-indahnya (*fi ahsani taqwiim*). Ada nilai menuju keadaan yang sesuai dengan hakikat atau jati diri fitrah manusia. Pembangunan dalam Islam adalah menempati peringkat jiwa (ruhani) yang oleh para sarjana muslim disebut sebagai *tazkiyat an nafs*.²⁹ Berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S. 91 ayat 9-10. "Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya".³⁰

Dari paparan pendahuluan tersebut, yang menjadi sorotan penulis dalam pengkajian tulisan ini adalah bagaimana konsep pertumbuhan dan pemerataan menurut ekonomi syariah yang dapat menjadi solusi bagi terciptanya keadilan ekonomi masyarakat.

B. Makna Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi modern adalah perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran masyarakat.³¹ Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi

²⁷ Malik bin Nabi, *al-Muslim fi 'Alam al-Iqtisod* (Beirut: Dar al-Syuruq, 1974), h. 255.

²⁸ Ibrahim Yusuf, *Istiratijiyatu wa Teknik al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah fi al-Islam* (Kairo: al-Ittihad al-Dauli li al-Bunuk al-Islamiyah, 1981), h. 269.

²⁹ M. Umer Chapra, dkk. *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 63.

³⁰ Lihat Q.S. 91 (9-10)

³¹ Sadono Sukirno, *op.cit.*, h. 413-414.

fiskal yang terjadi di suatu negara seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan beberapa perkembangan lainnya.

Kondisi ini membuat para ekonom bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional risil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha perombakan sektor pertanian yang tradisional, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Dalam kajian ekonomi, kedua istilah di atas terkadang digunakan dalam konteks yang hampir sama. Banyak orang mencampuradukkan penggunaan kedua istilah tersebut. Mencampuradukan istilah ini walaupun tidak dapat dibenarkan, pada dasarnya tidak terlalu mempengaruhi kajian ekonomi, karena inti pembahasan pada akhirnya akan berhubungan erat dengan perkembangan perekonomian suatu negara. Baik perkembangan dari segi investasi, pengeluaran pemerintah, konsumsi maupun ekspor impor. Hal ini juga didasarkan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang selama ini dipakai secara teori melalui *Gross National Product* (GNP). GNP didefinisikan sebagai jumlah nilai akhir dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam seluruh kegiatan ekonomi selama satu tahun. GNP ini mengukur aliran penghasilan negara (dari pertumbuhan ekonomi) selama kurun waktu tertentu. Berikut formulanya.

$$\text{GNP} = C + I + G (E - M) + Z^{32}$$

Di mana:

C = *Consumer Spending*

I = *Investement Spending*

G = *Output for Government*

$(E-M)$ = *Net Export or Import*

Z = *Zakat*

Dalam ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi.³³ Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan *a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare*.³⁴ (Pertumbuhan terus-

³² Tambahan huruf Z (Zakat) merupakan konsep ekonomi Islam dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, dimana hal tersebut tidak terdapat dalam konsep ekonomi konvensional, dan tidak dimasukkan dalam pengukuran ini, karena yang diambil adalah dari pengukuran pertumbuhan ekonomi yang ada di Amerika Serikat pada tahun 1987, tapi bisa dimasukkan dalam negara yang memakai sistem ekonomi Islam dalam pelaksanaan ekonominya.

³³ Sadono Sukirno, *op.cit.* h. 415

³⁴ Hal ini bisa dilihat dalam pemikiran-pemikiran ilmuwan muslim klasik, seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, At-Tusi, Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim. Penjelasan tentang pemikiran ekonomi para ulama tersebut lihat, Abul Hasan M.Sadeq dan Aidit Ghazali, *Readings in Islamic Economic Thought*, (Malaysia, Loqman Malaysia, 1992).

menerus dari faktor-faktor produksi secara benar akan mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia).

Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam adalah *the process of alleviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life*³⁵ (Proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan).

Dalam pengertian ini, maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral. Dalam pertumbuhan ekonomi ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Sumberdaya yang dapat dikelola (*investible resources*)
2. Sumberdaya manusia (*human resources*)
3. Wirausaha (*entrepreneurship*)
4. Teknologi (*technology*)³⁶

Islam juga melihat bahwa faktor-faktor di atas juga sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi.

1. **SDM yang dapat dikelola (*investable resources*)**

Pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan sumberdaya yang dapat digunakan dalam memproduksi asset-asset fisik untuk menghasilkan pendapatan. Aspek fisik tersebut antara lain tanaman industri, mesin, dsb. Pada sisi lain, peran modal juga sangat signifikan untuk diperhatikan. Dengan demikian, proses pertumbuhan ekonomi mencakup mobilisasi sumberdaya, merubah sumberdaya tersebut dalam bentuk asset produktif, serta dapat digunakan secara optimal dan efisien. Sedangkan sumber modal terbagi dua yaitu sumber domestik/internal serta sumber eksternal.

Negara-negara muslim harus mengembangkan kerjasama ekonomi dan sedapat mungkin menahan diri untuk tidak tergantung kepada sumber eksternal. Hal ini bertujuan

³⁵ Abul Hasan Muhammad Sadeq, *Economic Growth in An Islamic Economy*, tulisan dalam *Development and Finance in Islam*, (Malaysia, International Islamic University Press, 1987), h. 55

³⁶ Munawar Iqbal, *Financing Economic Development*, Abul Hasan Muhammad Sadeq, *Economic Growth in An Islamic Economy*, tulisan dalam *Development and Finance in Islam*, (Malaysia, International Islamic University Press, 1987), h. 102

untuk meminimalisir beban hutang yang berbasis bunga dan menyelamatkan generasi akan datang dari ketergantungan dengan Barat.³⁷ Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan sumberdaya domestik seperti tabungan dan simpanan sukarela, pajak ataupun usaha lain berupa pemindahan sumberdaya dari orang kaya kepada orang miskin.

2. SDM (*human resources*)

Faktor penentu lainnya yang sangat penting adalah sumberdaya manusia. Manusialah yang paling aktif berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Peran mereka mencakup beberapa bidang, antara lain dalam hal eksploitasi sumberdaya yang ada, pengakumulasian modal, serta pembangunan institusi sosial ekonomi dan politik masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, maka perlu adanya efisiensi dalam tenaga kerja. Efisiensi tersebut membutuhkan kualitas profesional dan kualitas moral. Kedua kualitas ini harus dipenuhi dan tidak dapat berdiri sendiri. Kombinasi keduanya mutlak dipadukan dalam batas-batas yang rasional.

3. Wirausaha (*entrepreneurship*)

Wirausaha merupakan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat determinan. Wirausaha dianggap memiliki fungsi dinamis yang sangat dibutuhkan dalam suatu pertumbuhan ekonomi. Nabi Muhammad Saw, dalam beberapa hadits menekankan pentingnya wirausaha. Dalam hadits riwayat Ahmad beliau bersabda, "Hendaklah kamu berdagang (berbisnis), karena di dalamnya terdapat 90 % pintu rezeki". Dalam hadits yang lain beliau bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah perdagangan (bisnis)".³⁸

Dengan demikian, semangat *entrepreneurship* dan kewiraswastaan harus ditumbuhkan dan dibangun dalam jiwa masyarakat. Muhammad Yunus telah menekankan pentingnya pembangunan jiwa wirausaha dalam pembangunan ekonomi di negara-negara muslim yang tergolong miskin. Dalam hal ini ia mengatakan, : "Upah buruh bukanlah satu jalan mulus bagi pengurangan kemiskinan, justru wirausahalah yang mempunyai potensi lebih besar dalam meningkatkan basis-basis asset individual daripada yang dimiliki oleh upah kerja".³⁹

³⁷ Abul hasan Muhammad Sadeq, *op.cit.*, h. 56

³⁸ Beban hutang merupakan permasalahan dunia yang saat ini sangat sulit dicari jalan keluarnya. Beban ini sangat terasa khususnya bagi negara-negara berkembang. Solusi yang diberikan selama ini terkesan tamal sulam. Biasanya pemecahannya berupa pemberian tambahan pinjaman baru yang menyebabkan jumlah hutang yang ditanggung negara pengutang semakin membengkak. Padahal jumlah angsuran utang pokok dan bunga yang diteima oleh bank dunia sudah melebihi jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia kepada negara dunia ketiga secara menyeluruh (Lihat Sumitro Djoyohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Obor Indonesia, 1991), h. 384.

³⁹ M.Umer Chapra, *Islam and Economic*, *op.cit.*, h. 136

Menumbuhkan kembangkan jiwa kewisahausahaan akan mendorong pengembangan usaha kecil secara signifikan. Usaha kecil, khususnya di sektor produksi akan menyerap tenaga kerja yang luas dan jauh lebih besar. Beberapa studi yang dilakukan di sejumlah negara oleh Michigan State University dan para sarjana, telah menunjukkan secara jelas kontribusi yang besar dan industri kecil dan usaha mikro dalam memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Mereka mampu menciptakan lapangan kerja bahkan secara tidak langsung mereka berarti mengembangkan pendapatan dan permintaan akan barang dan jasa, peralatan, bahan baku dan ekspor. Mereka adalah industri padat karya yang kurang memerlukan bantuan dana luar (asing), bahkan kadang tidak begitu tergantung kepada kredit pemerintah dibanding industri berskala besar.

Karena itu, tidak mengherankan apabila saat ini muncul kesadaran yang meluas bahwa strategi industrialisasi modern yang berskala besar pada dekade terdahulu secara umum telah gagal memecahkan masalah-masalah keterbelakangan global dan kemiskinan⁴⁰. Litte, Scietovsky dan Scott telah menyimpulkan bahwa industri-industri modern yang berkla besar biasanya kurang dapat menghasilkan keuntungan daripada industri-industri kecil, di samping itu industri besar lebih mahal dalam hal modal dan lebih sedikit menciptakan lapangan pekerjaan⁴¹. Karena itulah Usaha Mikro (Industri kecil) secara luas dipandang sebagai suatu cara yang efektif untuk meningkatkan kontribusi sektor swasta, baik untuk tujuan-tujuan pertumbuhan maupun pemerataan bagi negara-negara berkembang.⁴² Banyak para sarjana meragukan kontribusi industri-industri besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dibanding industri kecil dan usaha mikro.⁴³

Karena itulah Hasan Al-Banna memberikan dan mengembangkan industri rumah tangga yang utama dalam pembahasan tentang reformasi ekonominya sesuai dengan jaran Islam. Hal itu beliau tekankan karena akan membantu penyediaan lapangan kerja produktif bagi semua anggota masyarakat miskin, dengan demikian akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.⁴⁴

⁴⁰ Muhammad Yunus, *The Poor as the Engine of Development*, dalam *Economic Impact*, 2 (1988), h. 31

⁴¹ Carl Lidholm dan Donald Mead, *Small Scale Enterprise : A Profile*, diproduksi kembali dari *Small Scale Industries in Developing Countries : Empirical Evidence and Policy Implication*, (Michigan State: University Development Paper, 2, 1998), h. 12.

⁴² Ian Litte, Tibor Scietovsky dan Maurice Scott, *Industri and Trade in Some Developing Countries* (London: Oxford University Press, 1970), h. 91

⁴³ Baru-baru ini sejumlah buku telah diterbitkan untuk menunjukkan kekuatan industri kecil. Lihat Graham Gudgin, *Industrial Location Process and Employment Growth* (London : Gower, 19978, dan lihat pula David Birch, *The Job Generation, Process* (Cambridge, Mass : MIT Program on Neighbourhood and Regional Change, 1979).

⁴⁴ Hasan Al-Banna, *Majmu'at at-Rasail*, (Alexandaria, Darud Dakwah, 1989), h. 267.

Dari paparan di atas dapat ditegaskan bahwa peran wirausaha dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang tak terbantahkan. Kelangkaan wirausaha bahkan bisa menyebabkan kurangnya pertumbuhan ekonomi walaupun faktor-faktor lain banyak tersedia. Dalam hal ini pula Islam sangat mendorong pengembangan semangat wirausaha untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

4. Teknologi

Para ekonom menyatakan bahwa kemajuan teknologi merupakan sumber terpenting pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dianggap tidak mengikuti proses sejarah secara gradual, tidak terjadi terus-menerus dalam suatu keadaan yang tidak bisa ditentukan. Dinamika dan diskontinuitas tersebut berkaitan erat dan ditentukan oleh inovasi-inovasi dalam bidang teknologi (research and development) yang menghasilkan perubahan teknologi. Dalam Al-quran juga ada perintah untuk melakukan eksplorasi segala apa yang terdapat di bumi untuk kesejahteraan manusia.⁴⁵ Eksplorasi ini jelas membutuhkan penelitian untuk menjadikan sumberdaya alam tersebut berguna dan bermanfaat bagi manusia.

C. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Dari Sudut Islam

Keseimbangan orientasi duniawiyah dan ukhrawiyah merupakan orientasi yang diidamkan, khususnya dalam Islam. Berangkat dari orientasi yang seimbang antara duniawiyah (materi) dan ukhrawiyah (kepuasan non-materi) itulah Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan satu sarana untuk menjamin tegaknya keadilan sosial secara kekal. Karena, menurut Islam, keadilan sosial adalah salah satu unsur penting dari dinamika sosial. Dalam konteks suatu perekonomian yang sedang tumbuh inilah kue pendapatan nasional dapat diperbesar demi kemungkinan masing-masing menerima secara adil dari pertumbuhan tersebut.

Islam tidak menyukai perbedaan kekayaan dalam masyarakat melebihi titik tertentu. Sebab, pada gilirannya ini akan menimbulkan kebencian dan permusuhan yang membawa pada suatu konflik keras diantara berbagai bagian masyarakat yang pada akhirnya menghancurkan fondasinya. Ketika ketidak merataan ekonomi berubah menjadi kecenderungan yang tidak wajar dan orang-orang miskin menjadi budak yang tidak berdaya ditangan orang-orang kaya, maka itu tanda-tanda kehancuran bagi orang-orang itu.

Islam bagaimanapun juga tidak akan membolehkan situasi semacam itu terus berkembang. Karena itu, islam menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah ketidak merataan

⁴⁵ Ayat yang menjelaskan tentang perintah Allah untuk melakukan eksplorasi di bumi misalnya surat 16:14, 30:46, 35:12, 45:12, 36:33-35. Penjelasan tentang ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan ekonomi, Lihat Muhammad M.Akram Khan, *Economic Message of Quran*, (Kuwait: Islamic Book Published, 1996)

ekonomi agar tidak melebihi batas-batas yang wajar dan alamiah. Kondisi semacam itu akan tercipta dalam masyarakat yang memberikan kesempatan yang sama pada semua orang dalam perjuangan hidup mereka, dan memungkinkan setiap individu untuk menggunakan kemampuan, kepandaian dan keterampilan dengan sebaik-baiknya dalam usaha memenangkan sebuah posisi di masyarakat.

Islam mengambil tindakan pencegahan untuk menjamin dan menjaga kondisi dan kebutuhan manusia agar terjadi distribusi kekayaan yang wajar. Tidak boleh ada pelanggaran, atau pemerkosaan hak-hak individu; tidak boleh ada orang yang diijinkan untuk mengumpulkan kekayaan melebihi batas-batas yang wajar, tidak juga seseorang dibiarkan untuk mati kelaparan, tetapi semuanya diberi imbalan sesuai kemampuan, tanggung jawab dan kebutuhan ekonominya. Dengan kata lain, Islam tidak menganjurkan persamaan yang semu dalam pemilikan dan pencarian kekayaan. Hal itu semata-mata demi keadilan seseorang dalam mendapatkan kekayaan, yang akhirnya dapat memberikan pendidikan dan latihan pada manusia selama mereka menggunakan kebutuhannya secara sah. Islam hanya menginginkan keadilan bagi semua orang dalam mencari kekayaan. Untuk tujuan itu, ia menyediakan pendidikan dan latihan bagi orang-orang dan menerapkan aturan-aturan hukum yang diperlukan. Inilah prinsip keadilan islam agar ketidakmerataan kekayaan yang berlebihan dapat dihapuskan secara permanen.

Suatu lingkungan sosial yang di dalamnya setiap orang menikmati hasil pertumbuhan jelas lebih unggul dibandingkan dengan lingkungan sosial lainnya yang berisi orang-orang yang sebagian menikmati sementara yang lain menjadi korban.⁴⁶ Dengan demikian, kebijaksanaan pertumbuhan dalam suatu perekonomian Islam harus ditujukan untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan dari suatu pertumbuhan ekonomi untuk semua manusia tanpa memandang secara diskriminatif antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam harus memasukkan aspek aksiologis (nilai, moral) agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya diorientasikan kepada kesejahteraan materi sajamelainkan memasukkan juga aspek ruhaniyah. Memasukkan aspek ruhaniyah ini dalam pandangan Islam tidak akan menimbulkan masalah-masalah matematis, karena sifatnya yang abstrak sebab, yang dioptimalisasikan, sekalipun ditinjau dari sudut pandang ilmu ekonomi neo-klasik, bukanlah arus konsumsi akan tetapi “nilai guna” yang berkaitan dengannya, yang ia sendiri adalah kualitas yang tidak berwujud.

⁴⁶ Naqvi, *Etika dan Ilmu, Ibid*, h. 134

Menurut Muhammad Qal'ah Jey dalam buku *Mabahits fi Al-Iqtishad al-Islamy* “salah satu tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi”.⁴⁷ Tetapi dalam point ini terdapat sebuah pertanyaan besar yaitu, apakah yang menjadi prioritas dalam pertumbuhan ekonomi itu pemerataan (*growth with equity*) atau pertumbuhan itu sendiri (*growth*) *an sich*. Jawaban pertanyaan tersebut adalah bahwa Islam membutuhkan kedua aspek tersebut. Baik pertumbuhan (*growth*) maupun pemerataan (*equity*), dibutuhkan secara simultan.

Dalam ekonomi Islam pertumbuhan ekonomi yang dituju adalah pertumbuhan optimal, baik dari segi kesejahteraan materi maupun rohani, Islam tidak memperkenankan konsumsi modal dan pertumbuhan yang melampaui batas yang memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah bagi manusia. Jadi menurut Islam tingkat pertumbuhan yang rendah yang diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata akan lebih baik daripada tingkat pertumbuhan yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan distribusi yang merata. Namun demikian, yang lebih baik dari keduanya adalah pertumbuhan yang tinggi tanpa memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah dari manusia dan disertai dengan distribusi pendapatan yang merata.

Jadi Islam tidak akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi, karena memang pertumbuhan (*growth*) sangat dibutuhkan.⁴⁸ Pada sisi lain, Islam juga tetap memandang pentingnya pemerataan, karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh,⁴⁹ terlebih apabila pendapatan dan faktor produksi banyak terpusat bagi sekelompok kecil masyarakat.

Dari data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang digambarkan sebelumnya tampak membaik, kita tidak boleh langsung bergembira dan menyatakan bahwa pemulihan ekonomi rakyat Indonesia mulai berhasil. Harus dicatat, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia setinggi langit, misalnya mencapai 20%, dan perkapita mencapai US\$. 3.200, seperti Malaysia. Hal ini belum tentu menggembirakan kita, bila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, karena mungkin saja pertumbuhan yang tinggi berada di tangan segelintir konglomerat tertentu.

⁴⁷ Muhammad Qal'ah Jey, *Mabahits fi Al-Iqtishad al-Islamy*, (Dar An-Nafais, Kuwait), tt. 35.

⁴⁸ Menarik untuk dicermati pendapat Sumitro Djojohadikusumo yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan segi pemerataan pendapatan menjadi dua sayap kembar yang tak terpisahkan dalam satuan gerak pembangunan. Sehingga akan terwujud pula keseimbangan dan efisiensi dalam kegiatan produksi dan keadilan dalam tata masyarakat. (Lihat, Sumitro Djojohadikusumo, *Indonesia dalam Perkembangan Dunia : Kini dan Masa Datang*, (LP3ES, cet.v.), h. 147.

⁴⁹ Ada beberapa jenis pertumbuhan dan akibat-akibat negatifnya yang harus dihindarkan, **Pertama**, *Jobless Growth*, yaitu seluruh perekonomian tumbuh, namun tidak memperluas tenagakerja. **Kedua**, *Ruthless growth*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang kebanyakan menguntungkan pihak yang kaya, membiarkan jutaan orang tetap terjerembab dalam kemiskinan. **Ketiga** *Viocess Growth*, yaitu pertumbuhann yang tidak memberdayakan masyarakat dan membungkam suara alternatif. **Keempat**, *Rootless growth*, yaitu pertumbuhan yang menyebabkan hilangnya identitas cultural masyarakat. **Kelima**, *futureless growth*, yaitu pertumbuhan yang di dalamnya generasi muda melakukan pemborosan sumberdaya yang dibutuhkan generasi mendatang. (Richard Posner, *The Essential Holmes*, (Chicago : Chicago University Press, 1992), h. 161.

Menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi melalui indikator PDB Domestik Bruto dan perkapita semata, tidaklah tepat. Dalam paradigma ekonomi Islam pertumbuhan haruslah sejalan dengan keadilan dan pemerataan pendapatan.⁵⁰

Perhitungan perkapita merupakan perhitungan agregat yang belum tentu mencerminkan kondisi riil. Angka rata-rata itu diperoleh berdasarkan pembagian atas Produk Domestik Bruto oleh jumlah penduduk. Sehingga jumlah penduduk sebagai faktor pembagi makin besar, sudah tentu hasil angka perkapita yang diperoleh semakin kecil, demikian pula sebaliknya. Wilayah Jabotabek misalnya, angka pendapatan perkapitanya pasti akan sangat besar, sebab pertumbuhan ekonomi lebih terkonsentrasi di wilayah itu. Tetapi bila seluruh penduduk yang mayoritas tinggal di desa disertakan sebagai faktor pembagi tadi, maka perkapita secara nasional menjadi berkurang. Jadi kesimpulannya, PDB dan perkapita tidak dapat menggambarkan kondisi riil. Karena itu, PDB yang tinggi belum cukup menggambarkan perbaikan ekonomi rakyat secara adil. Hal ini karena masih banyak penduduk Indonesia tidak memiliki penghasilan tetap, dan malah dibawah garis kemiskinan, misalnya penduduk Indonesia di kawasan timur dan kawasan-kawasan lainnya sebagai contoh di kawasan pegunungan Cartenz, daerah operasi PT. Freeport Indonesia, kawasan yang tampak makmur, hanyalah Tembaga Pura. Di luar wilayah itu, banyak penduduk yang belum mendapat kesempatan memperoleh penghasilan tetap.

Namun dalam perhitungan PDB perkapita, mereka yang fuqara' dan masakin ini dimasukkan kedalam faktor pembagi, sehingga seolah-olah mereka memperoleh penghasilan tetap mencapai Rp. 6,3 juta pertahun (sekitar Rp. 525.000) perbulan. Mereka seolah-oleh pula menikmati kue pembangunan. Padahal sejatinya, mereka hidup dibawah garis kemiskinan.

Kondisi ini sekaligus menjadikan gambaran yang jelas, betapa kesenjangan antara yang kaya dan miskin di negeri ini telah sedemikian hebatnya. Realita disparitas ekonomi ini tidak saja terjadi di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, tetapi juga negara – negara maju yang menjadi pendekar kapitalisme, seperti Amerika Serikat.

Hyman Minsky dalam buku *Stabilizing Unstable Economy* (1986) mengatakan, masyarakat kapitalisme itu tidak adil. Suatu fakta menunjukkan bahwa meskipun terjadi

⁵⁰ Keharusan tegaknya keadilan distribusi dalam pertumbuhajn ekonomi telah lama menjadi bahasan dan perhatian para ulama klasik, jauh sebelum ekonom kapitalis membahasnya (Lihat Abdullah Abdul Husein At-Tariqy, *op.cit.*, h. 285). Prioritas keadilan dalam pertumbuhan secara panjang telah dibahas oleh Afzalur Rahman (Lihat, Afzalur Rahman, *Muhammad As A Trader*, London, The Muslim Schools Trust, 1982 trej. Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (Jakarta: Yayasan Swarna Bumi, 1997), h. 119-221., Lihat juga Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*. Terj. Doktrin Ekonomi Islam, Dana Bhakti Waqaf, (Yogyakarta: 1995), h. 31-35. Lihat juga Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nizaham al-Iqtishad Al-Islami*, (Beirut : Darul ummah, 1990), h. 272

pertumbuhan ekonomi di AS, tetapi kesenjangan masih saja lebar, dan yang miskin semakin miskin.⁵¹

Realita kesenjangan pendapatan, juga terjadi di Indonesia pada masa orde baru. Jadi meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong tinggi dan mendapat pujian dari luar negeri dan lembaga keuangan internasional, namun kemiskinan masih menggurita dan kesenjangan masih menganga. Belajar dari kegagalan pembangunan Indonesia yang pincang itu, maka bangsa Indonesia (khususnya Pemerintah), harus melakukan reorientasi pembangunan dari sistem sentralistik menjadi tersebar. Hal itu perlu ditempuh untuk mencegah terulangnya kegagalan pembangunan nasional selama ini. Maka, penerapan sistem ekonomi daerah, sebenarnya dimaksudkan untuk menjembatani kondisi ekonomi nasional yang cukup timpang itu. Dengan otonomi daerah, diharapkan tercipta makin banyak pusat pertumbuhan, setidaknya ditingkat propinsi. Selama ini dengan pemerintah terpusat, pertumbuhan yang tercipta pun cenderung terpusat. Tidak heran jika pemerintah pusat bertindak seperti *vacum cleaner*, menyedot semua aset yang berada di daerah, termasuk daerah miskin sekalipun.

Sementara Direktur IMF, Christine Lagarde, mengungkapkan bahwa perbaikan kondisi ekonomi saat ini harus menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan yang lebih baik. Menurut Lagarde, terdapat tiga prioritas yang harus dilaksanakan, yaitu: (1) memperkuat fundamental ekonomi yang tepat ditengah perekonomian dunia yang saling terhubung, (2) mengatasi masalah ketimpangan pendapatan yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan tekanan politik, dan (3) menangani permasalahan korupsi dan perubahan iklim yang menjadi kepedulian generasi muda.⁵²

Berdasarkan kondisi ketimpangan internasional dan labilnya pasar, maka negara Islam, organisasi dan lembaga Islam lainnya turut serta secara aktif mencapai tujuan khusus ekonomi pembangunan yaitu *growth with equity*.

Meskipun Islam menekankan keadilan sosio – ekonomi dalam pertumbuhan, hal ini tidak berarti bahwa Islam tidak mementingkan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi merupakan tuntutan obyektif dan harus dilakukan dengan cepat dan dalam proporsi yang besar. Tanpa pertumbuhan ekonomi, keadilan memang dapat dirasakan, tetapi masih sulit untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan, karena proporsi kue ekonomi yang dibagikan masih kurang cukup.

⁵¹ Hyman Minsky dalam M. Umer Chapra, *Islam dan Economic Challenge*, terjemahan, (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1999), h. 139 – 141.

⁵² Manual Meeting, Pertemuan Tahunan *World Bank Group* dan *the International Monetary Fund (IMF)*. Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur Bank Dunia dan IMF 2017 berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat, pada 9–15 Oktober 2017.

Dalam rangka pencapaian keadilan sosio – ekonomi yang dapat membahagiakan itulah realisasi pertumbuhan ekonomi memang sangat diperlukan. Tetapi tetap tak bisa terlepas dari sistem distribusi kue ekonomi yang berdimensi keadilan, baik untuk jangka sekarang maupun mendatang.

Bagaimana pun Islam tidak mendukung ketidakmerataan, juga tidak mengajarkan pemerataan kekayaan, tetapi ia mengakui adanya suatu tingkatan ekonomi yang alamiah dalam masyarakat tanpa mengkonsentrasikan pada beberapa tempat tertentu. Islam juga tidak akan menyetujui perbedaan kekayaan yang tidak adil diantara berbagai kalangan masyarakat atau peraturan-peraturan yang dibuat-buat untuk mengubah perbedaan alamiah dalam masyarakat. Pendidikan moral akan memberikan pertolongan dalam mempertahankan perbedaan kekayaan dalam batas-batas yang wajar, sedangkan aturan-aturan hukumnya akan membantu menyebarkan kekayaan keseluruhan anggota masyarakat.

Nabi Saw mengemukakan tentang kebutuhan hidup yang paling pokok dalam perkataan berikut ini: “seorang anak manusia tidak mempunyai hak yang lebih baik daripada jika ia mempunyai sebuah rumah dimana ia dapat hidup, sepotong kain dimana ia dapat menyembunyikan ketelanjangannya, serta sepotong roti dan air”(Tirmizi). Ibn Hizam menjelaskan kebutuhan dasar individu sebagai berikut: “Ia harus mempunyai makanan yang cukup untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat dan kuat. Ia harus mempunyai pakaian yang pantas dan cocok untuk musim dingin dan panas. ia harus mempunyai tempat tinggal yang memadai untuk melindungi dirinya dari cuaca dan memberinya keleluasan pribadi”. Al-Qur’an juga menegaskan bahwa meskipun terdapat ketidakmerataan kekayaan dalam masyarakat, tidak boleh ada orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sebab semuanya mempunyai hak hidup yang sama.

Diriwayatkan oleh Umar dalam tahun-tahun terakhir kekhalifahannya berkata “sesuatu yang saya ketahui hari ini, jika telah saya ketahui sebelumnya, saya tidak akan pernah menundanya lagi dan tidak pula ragu-ragu untuk menyalurkan kelebihan kekayaan pada kaum Muhajirin yang miskin.” Diriwayatkan juga bahwa Ali berkata, “Allah mewajibkan orang yang kaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orang-orang miskin sampai kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Jika mereka lapar atau tidak mempunyai pakaian atau terlibat dalam kesulitan keuangan lainnya, maka hal itu semata-mata disebabkan orang-orang kaya tidak melaksanakan kewajibannya.

Oleh karenanya, Allah akan bertanya pada mereka pada Hari Pengadilan dan akan menyiksa mereka.”⁵³

Setelah mengutip al-Quran dan hadits Nabi, Ibn Hazm berkata, ”Adalah kewajiban orang-orang kaya untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin dan yang membutuhkannya di desa tau di kota mereka. Dan jika harta karunnya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka, maka negara berhak mengambil kelebihan kekayaan mereka. Selanjutnya, ia berkata bahwa seluruh sahabat Nabi sepakat terhadap hal ini, yaitu jika ada seseorang yang lapar atau tidak mempunyai pakaian atau tempat tinggal, maka negara berkewajiban memberikan kebutuhan-kebutuhannya yang diperoleh dari kelebihan orang-orang kaya.”⁵⁴

Untuk mewujudkan pemerataan, menurut M. Umer Chapra, setidaknya ada lima unsur utama yang harus dilakukan. *Pertama*, mengadakan pelatihan dan menyediakan lowongan kerja bagi pencari kerja, sehingga terwujud *full employment*. *Kedua*, memberikan sistem upah yang pantas bagi karyawan. *Ketiga*, mempersiapkan asuransi wajib untuk mengurangi pengangguran, kecelakaan kerja, tunjangan hari tua dan keuntungan-keuntungan lainnya. *Keempat*, memberikan bantuan kepada mereka yang cacat mental dan fisik, agar mereka hidup layak. *Kelima*, mengumpulkan dan mendayagunakan zakat, infaq, dan sadaqah, melalui undang-undang sebagaimana undang-undang pajak.

Dengan upaya-upaya itu, maka kekayaan tidak terpusat pada orang-orang tertentu. Al-Qur’an dengan tegas mengatakan, “kekayaan hendaknya tidak terus menerus beredar di kalangan orang-orang kaya saja”. (QS. 59 : 7).

Selanjutnya menurut Umer Chapra ada lima tindakan kebijakan pembangunan ekonomi (*economic development*) yang disertai dengan keadilan dan stabilitas, yaitu :

1. Memberikan kenyamanan kepada faktor manusia
2. Mereduksi konsentrasi kekayaan
3. Melakukan restrukturisasi ekonomi
4. Melakukan restrukturisasi keuangan, dan
5. Rencana kebijakan strategis⁵⁵

Manusia merupakan elemen pokok dari setiap program pembangunan. Mereka adalah tujuan sekaligus sebagai sasaran pembangunan. Apabila mereka tidak dipersiapkan secara tepat untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, tidak mungkin akan berhasil

⁵³ Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (Muhammad as A Trader), (Jakarta: Penerbit Yayasan Swarna Bhumi), h. 88-91

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ M. Umer Cahpra, *Islam and Economic Development, op.cit*, h. 84.

mengaktualisasikan tujuan-tujuan pokok Islam dalam pembangunan. Karena itu, tugas yang paling menantang di depan setiap negara muslim adalah memotivasi faktor manusia untuk melakukan aktivitas konstruktif bagi pembangunan yang berkeadilan. Setiap individu harus memberikan apa yang terbaik dengan bekerja keras dan efisien yang disertai integritas, kejujuran, disiplin dan siap berkorban untuk mengatasi hambatan dalam perjalanan pembangunan.

M. A. Mannan menilai bahwa konsep pembangunan dalam Islam memiliki keunggulan dibandingkan konsep modern tentang pembangunan. Keunggulan tersebut terletak pada motivasi pembangunan ekonomi dalam Islam, tidak hanya timbul dari masalah ekonomi manusia semata-mata tetapi juga dari tujuan ilahi yang tertera dalam Al-quran dan Hadits.⁵⁶

Memang harus diakui bahwa pertumbuhan perkapita sangat tergantung kepada sumberdaya alam. Namun sumberdaya alam saja bukan syarat yang cukup untuk pembangunan ekonomi. Masih dibutuhkan satu syarat lain yang utama yaitu perilaku manusia. Perilaku ini memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Untuk itu harus ada upaya menempa perilaku manusia tersebut ke arah yang mendukung pembangunan.

Kesimpulan

Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi bukan hanya aktivitas produksi material saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang terkait erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya diukur dari aspek ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia sekaligus.

Kajian tentang pertumbuhan (*growth*) ekonomi dan pemerataan dapat ditemukan dalam konsep ekonomi Islam. Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al-quran, sunnah maupun pemikiran-pemikiran ulama Islam terdahulu, namun kemunculan kembali konsep ini, khususnya beberapa dasawarsa belakangan ini terutama berkaitan kondisi negara-negara muslim yang terkebelakang yang membutuhkan formula khusus dalam strategi dan perencanaan pembangunannya. Kekhasan pertumbuhan dan pembangunan dalam

⁵⁶ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, terj. M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf, 1997), h. 393-394.

ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumberdaya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat.

Daftar Referensi

- Abdullah Abdul Husein At-Tariqy, *Al-Iqtishad Al-Islami, Ushuluhi wa Mubaun wa Ahdaf*, Dar An-Nafais, Kuwait, 1999
- Abul Hasan Muhammad Sadeq, *Economic Growth in An Islamic Economy*, tulisan dalam *Development and Finance in Islam*, Malaysia: International Islamic University Press, 1987
- Ace Pce Pertadireja, *Pengantar Ekonomika*, Yogyakarta, BPFE, 1984
- Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*. Terj. Doktrin Ekonomi Islam, Dana Bhakti Waqaf, Yogyakarta, 1995.
- _____, *Muhammad As A Trader*, London, The Muslim Schools Trust, 1982 terj. Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, Jakarta, Yayasan Swarna Bumi, 1997
- Al-Quran dan Terjemahan
- Anwar Ibrahim, *The Asia Renaissance*, terj Ihsan Ali fauzi, Renaisans Asia, Bandung: Mizan, 1998
- Badan Pusat Statistik, 2020.
- Carl Lidholm dan Donald Mead, *Small Scale Enterprise : A Profile*, diproduksi kembali dari Small Scale Industries in Developing Countries : Empirical Evidence and Policy Implication, (Michigan State University Development Paper, dalam *Economic Impact*, 2, 1998
- David Birch, *The Job Generation, Process* (Cambridge, Mass : MIT Program on Neighbourhood and Regional Change, 1979.
- De Carvalho Fernando Cardim, “*Keynes and the reform of the capitalist social order*”. Journal of Post Keynesian Economics/Winter, Vol. 31, No. 2, (2008)
- Ervin Laszlo, *Millenium Ketiga, Tantangan dan Visi* (terj.3Rd Millenium The Challenge and Vision, Jakarta, Dinastindo, Adiperkasa Internasional, 1999
- Fritjof Capra, *Titik balik Peradaban, Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Budaya*, ter. (*The Turning Point, Science, Society, and The Rising Culture*), cet.3 Yogyakarta: Yayasan Betang Budaya, 1999
- George Soule, *Idea of the Great Economist*, terj, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, Jakarta: Kanisius, 1994
- Grahan Gudgin, *Industrial Location Process and Employment Growth*, London : Gower, 1997
- Harian.analisadaily.com/mobile/opini/news/kesenjangan pendapatan per kapita Indonesia. Terbitan 18 Maret 2018.
- Hasan Al-Banna, *Majmu'at at-Rasail*, Alexandria: Darud Dakwah, 1989
- Hyman Minsky dalam M. Umer Chapra, *Islam dan Economic Challenge*, Dana Bhakti Waqaf, Yogyakarta, terjemahan 1999
- <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/7-faktor-pendorong-turunnya-kemiskinan-di-indonesia-versi-bps/1531931>
- <http://www.freelists.org>
- Ian Litte, Tibor Scietovsky dan Maurice Scott, *Industri and Trade in Some Developing Countries*, London, Oxford University Press, 1970
- Ibrahim yusuf, *Istiratijiyatu wa Tiknik al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah fi al-Islam*, Kairo: al-Ittihad al-Dauli li al-Bunuk al-Islamiyah, 1981
- Kosim Abu, Taufiq, “*Ekonomi Biaya Tinggi, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi*”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume. 7, No. 2, Desember 2009.

- Kursyid Ahmad, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam*, dalam Etika Ekonomi Politik, (Risalah Gusti, Jakarta, 1977)
- M. Umer Chapra, dkk. *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam* Surabaya: Risalah Gusti, 1997
- _____, *Islam and The Economic Challenge*, The International Institute of Islamic Throught, (IIIT), USA, 1992. Edisi Indonesia, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Risalah Gusti, Jakarta, 1999
- _____, *Islam and Economic Development*, USA, The Internasional Institute of Islamic Though (IIIT), 1992
- M.Abdul Mannan, *Islamic Economiys, Theory and Practice*, terj. M.Nastangin, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta, Dana Bakti Waqaf, 1997
- Malik bin Nabi, *al-Muslim fi 'Alam al-Iqtishod*, Beirut: Dar al-Syuruq, 1974
- Mark Skousen, *Economics on Trials : Lies, Myths, and Realities*, USA: Bussiness One Irwin, 1991
- Michael P.Todaro, *Economic Development in The Third World*, New York, London, Longman 1989
- Muhammad M.Akram Khan, *Economic Message of Quran*, Kuwait: Islamic Book Published, 1996
- Muhammad Qal'ah Jey , *Mabahits fi Al-Iqtishad al-Islamy*, Dar An-Nafais, Kuwait
- Muhammad Yunus, *The Poor as the Engine of Development*, dalam Economic Impact, 2, 1988
- Richard Posner, *The Essential Holmes*, Chicago : Chicago University Press, 1992
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Edisi II, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999
- Sumitro Djojohadikusumo, *Indonesia dalam Perkembangan Dunia : Kini dan Masa Datang*, LP3ES, cet,v. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Obor Indonesia, 1991
- Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nizaham al-Iqtishad Al-Islami*, Darul ummah Beirut, 1990

PENGUKURAN KUALITAS LAYANAN AKADEMIK MENGUNAKAN MODEL *STUDENT SATISFACTION INVENTORY*

Diar Muzna Tangke, M.Si
Staf Pengajar Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon, Indonesia
email: diartangke@gmail.com

ABSTRACT

The biggest challenge for universities today is how to manage quality, especially the quality of academic services as the core business of higher education. The most important point is that the quality must be seen and measured from the point of view of consumers, especially from the point of view of students, not from the point of view of the leaders, officials or employees of the tertiary institution. Academic performance research results often show a low level of satisfaction for a dimension, not necessarily making that dimension a top priority priority if that dimension turns out to have a low level of importance. It is possible for a dimension with a level of satisfaction that is not too low to be prioritized if the level of importance is higher. This research is a literature study or literature study. The Student Satisfaction Inventory (SSI) model measures the level of academic service quality based on the satisfaction felt by students and the level of importance of each dimension of Student Satisfaction Inventory (SSI) that has been determined. By comparing student satisfaction and the importance of the Student Satisfaction Inventory (SSI) dimension, it can be described in the Importance Performance Matrix so that it can see student satisfaction with the quality of academic services that have been provided and how important the attributes or indicators of student disputes are.

Keywords: Academic service quality, Student Satisfaction Inventory (SSI), Importance Performance Matrix

ABSTRAK

Tantangan terbesar perguruan tinggi saat ini adalah bagaimana mengelola kualitas terutama kualitas layanan akademik sebagai *core business* dari perguruan tinggi. Poin yang terpenting adalah kualitas itu harus dilihat dan diukur dari sudut pandang konsumen terutama sudut pandang dari mahasiswa bukan dari sudut pandang pimpinan, pejabat atau pegawai dari perguruan tinggi tersebut. Hasil penelitian pelayanan akademik sering menunjukkan tingkat kepuasan yang rendah untuk suatu dimensi, belum tentu membuat dimensi tersebut menjadi prioritas perbaikan utama apabila dimensi tersebut ternyata memiliki tingkat kepentingan (*importance*) yang rendah. Bisa saja suatu dimensi dengan tingkat kepuasan yang tidak terlalu rendah lebih diprioritaskan apabila tingkat kepentingannya lebih tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian literatur atau studi pustaka. Model *Student Satisfaction Inventory* (SSI) mengukur tingkat kualitas pelayanan akademik berdasarkan kepuasan (*satisfaction*) yang dirasakan mahasiswa dan tingkat kepentingan dari masing-masing dimensi *Student Satisfaction Inventory* (SSI) yang telah ditetapkan. Dengan membandingkan kepuasan mahasiswa dan kepentingan dari dimensi *Student Satisfaction Inventory* (SSI) maka dapat digambarkan dalam *Importance Performance Matrix* sehingga dapat melihat kepuasan mahasiswa atas kualitas layanan akademik yang telah diberikan dan bagaimana tingkat kepentingan dari atribut atau indikator kepuasan mahasiswa tersebut.

Keyword: Kualitas layanan Akademik, Student Satisfaction Inventory (SSI), Importance Performance Matrix

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu bangsa tidak bisa lepas dari kualitas sumber daya manusianya. Sumber daya alam yang melimpah dalam suatu negara hanya akan menjadi *idle* tanpa sumber daya manusia unggul yang mengelolanya. Peran pendidikan menjadi sangat penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, terampil, kreatif, inovatif, serta memiliki *attitude* (sikap dan perilaku) yang positif.

Pelayanan akademik yang diberikan oleh perguruan tinggi merupakan salah satu ukuran dari keberhasilan lembaga pendidikan dalam rangka memberikan produk jasa pendidikan. Hal ini mengakibatkan pihak lembaga pendidikan perlu melakukan perbaikan mutu layanan akademik secara terus menerus¹. Tingkat kualitas pelayanan *excellent* (terbaik) dari perguruan tinggi akan mendorong peningkatan kualitas output atau lulusannya yang pada akhirnya tujuan pengguna jasa perguruan tinggi atau mahasiswa dan perguruan tinggi dapat tercapai.

Mahasiswa sebagai *stakeholder* utama perguruan tinggi sudah semestinya dapat memperoleh apa yang diinginkan. Agar mahasiswa memperoleh apa yang diharapkan, maka institusi pendidikan harus dapat mensinergikan antara harapan mahasiswa dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Sinergisitas harapan mahasiswa dan kepentingan kampus akan tercapai apabila layanan akademik dilakukan dengan mengedepankan aspek kualitas, fasilitas memadai, dan manajemen yang profesional².

Tantangan terbesar perguruan tinggi saat ini adalah bagaimana mengelola kualitas terutama kualitas layanan akademik sebagai *core business* dari perguruan tinggi. Poin yang terpenting adalah kualitas itu harus dilihat dan diukur dari sudut pandang konsumen terutama sudut pandang dari mahasiswa bukan dari sudut pandang pimpinan, pejabat atau pegawai dari perguruan tinggi tersebut³. Kualitas layanan yang sering dirasakan tidak memuaskan antara lain: staf akademik dan dosen yang sering tidak hadir, atau hadir tidak tepat waktu, jam istirahat siang yang lama kembali ke ruang kerja sehingga surat ijin tertunda penyelesaiannya, pelayanan dari staf yang kurang ramah dan fasilitas belajar yang tidak memuaskan, papan tulis rusak, LCD, ruang kelas yang kotor, bahkan toilet yang berbau, kekurangan kualitas tenaga pengajar yang kompetendalam memberikan mata kuliah.

¹ Qomaria, "Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Institut Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Mahasiswa Pada Universitas Muhammadiyah Di Jawa Timur", Jurnal Aplikasi Manajemen.

² Sulekhul Amin, "Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Akademik Pada Sekolah Tinggi", Jurnal Wahana Akademika, vol. 4 No. 2, Oktober 2017.

³ Nunik Zuroidah, Implementasi Importance Performance Analysis (IPA) Untuk Mengidentifikasi Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Akademik", Jurnal Vol 26 No. 2, September 2015, hlm. 411-412

Kepuasan pengguna jasa pendidikan menjadi sangat penting bagi kemajuan sebuah institusi pendidikan, sebagaimana bagi sebuah perguruan tinggi maka kepuasan mahasiswa sebagai pengguna jasa utama menjadi tonggak bagi keberlangsungan suatu perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan kepuasan mahasiswa akan berdampak pada loyalitasnya terhadap perguruan tinggi tersebut. Seorang pengguna jasa (mahasiswa) yang loyal akan menjadi aset yang sangat bernilai bagi suatu perguruan tinggi, karena mahasiswa akan bersedia mempromosikan perguruan tinggi tersebut kepada orang lain, memberikan umpan balik positif terhadap institusi pendidikan, mengurangi pengaruh serangan dari para *competitor* institusi sejenis (*bergaining position*), serta meningkatkan citra positif dari institusi tersebut⁴.

Kualitas layanan merupakan indikator penting yang akan menentukan keputusan konsumen dalam hal ini mengguna jasa. Kualitas menurut Edward Deming mendefinisikan kualitas sebagai segala hal yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, sedangkan Philip B. Crosby mendefinisikan kualitas sebagai nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan⁵. Definisi yang lebih luas tentang kualitas dikemukakan Goetsch Davis, yang menyatakan bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan⁶. Dari pengertian diatas, maka kualitas dapat diartikan suatu kondisi produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan sebagai kebutuhan dan keinginan konsumen yang dirasa telah memenuhi atau melebihi harapan. Menurut Sviokla, kualitas memiliki delapan dimensi pengukuran yang terdiri atas aspek-aspek yaitu, kinerja (*performance*), keistimewaan produk (*features*), reliabilitas/keterbatasan (*reliability*), kesesuaian (*conformance*), ketahanan (*durability*), kemampuan pelayanan (*serviceability*), estetika (*aesthetics*), dan kualitas yang dirasakan (*perceived quality*)⁷.

Menurut Ruslan, kualitas layanan (*service quality*) merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan”⁸. Kualitas layanan yang dirasakan sesuai dengan harapan konsumen akan meningkatkan kepuasan dan pada akhirnya meningkatkan loyalitas konsumen. Menurut Pakpahan dalam Tuerah et al, kualitas layanan akademik merupakan perbandingan antara pelayanan akademik yang dirasakan pelanggan atau mahasiswa dengan kualitas pelayanan

⁴ Sulekhul Amin. *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Akademik Pada Sekolah Tinggi.*, Jurnal Wahana Akademika, vol. 4 No. 2, Oktober 2017

⁵ Yamit, Zulian, *Manajemen Kualitas: Produk dan Jasa*, (Yogyakarta:Penerbit Ekonisia, 2011), hlm. 7

⁶ *Ibid.*, hlm. 8

⁷ Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), hlm. 214-115.

⁸ Ruslan, Rosady, *Manajemen Public Relation dan Media Komuniasi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 280.

akademik yang diharapkan mahasiswa⁹. Menurut Sugiyanti dalam Mahmud, menyatakan bahwa perguruan tinggi bersifat layanan jasa terdapat atribut yang harus mendapat perhatian dalam perbaikan kualitas jasa, (1) ketepatan waktu pelayanan, (2) akurasi pelayanan, (3) kesopanan dan keramahan dalam memberikan layanan, (4) tanggung jawab, (5) kelengkapan, menyangkut lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana pendukung serta pelayanan komplementer lainnya, (6) kemudahan mendapatkan pelayanan, (7) variasi model pelayanan, seperti pola – pola baru serta *features* dari pelayanan dan lain – lain, (8) pelayanan pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas, penanganan permintaan khusus atau sebagainya, (9) kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, (10) atribut pendukung lainnya, seperti lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik, AC dan lain – lain¹⁰.

Model *Student Satisfaction Inventory* (SSI) dikembangkan oleh Noel-Levitz dan telah menjadi standar nasional untuk negara Amerika Serikat. Model *Student Satisfaction Inventory* adalah sebuah metode yang digunakan untuk menilai tingkat mutu layanan berdasarkan tingkat kepuasan yang dirasakan mahasiswa dan tingkat kepentingan dari setiap dimensi *Student Satisfaction Inventory*¹¹. Secara konseptual *Student Satisfaction Inventory* (SSI) terdiri dari 12 skala atau dimensi pengukuran antara lain:

1. *Academic advising effectiveness*, (efektifitas bimbingan akademik)
2. *Campus Climate* (iklim akademik)
3. *Campus life* (kehidupan kampus)
4. *Campus support service* (layanan penunjang kampus)
5. *Concern for the individual* (kepedulian terhadap individu mahasiswa)
6. *Campus safety and security* (keselamatan dan keamanan kampus)
7. *Service Excellence* (pelayanan terbaik).
8. *Student centeredness* (kegiatan mahasiswa),
9. *Responsiveness to Diverse Population* (responsivitas terhadap beragam populasi)
10. *Instructional effectiveness* (efektifitas perkuliahan),
11. *Recruitment and financial aid* (penerimaan mahasiswa baru dan beasiswa)
12. *Registration effectiveness* (efektifitas registrasi)

⁹ Tuerah, F.F.R, L.Maneke, H.N.Tawas, “*Analisis Kualitas Layanan Akademik Dan Administrasi Terhadap Kepuasan Mahasiswa*”, Jurnal EMBA, 3(4): 422-432, 2015, hlm. 424.

¹⁰ Mahmud, Marzuki, *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 82.

¹¹ Istiqomah dan Arigiyati, “*Pengukuran Kualitas Layanan Pendidikan Dengan Metode Student Satisfaction Inventory di Program Studi Pendidikan Matematika*”. Jurnal Sosiohumaniora.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian literatur atau studi pustaka dengan jenis data berupa data sekunder. Data yang diperoleh dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan.

PEMBAHASAN

Masyarakat sebagai pengguna (*user*) industry jasa, khususnya jasa pendidikan semakin cerdas dalam menentukan pilihan. Selain itu, perkembangan jasa pendidikan yang pesat dengan menawarkan berbagai keuntungan menuntut penyedia jasa pendidikan dalam hal ini institusi pendidikan terus melakukan perbaikan untuk dapat bertahan dalam persaingan industri jasa yang semakin ketat.

Student Satisfaction Inventory (SSI) merupakan instrumen yang digunakan dalam mengukur tingkat kualitas pelayanan akademik berdasarkan kepuasan (*satisfaction*) yang dirasakan konsumen dalam hal ini adalah mahasiswa dan tingkat kepentingan dari masing-masing dimensi SSI yang telah ditetapkan. Tingkat kepentingan dari setiap dimensi *Student Satisfaction Inventory* (SSI) diperlukan sebagai bahan analisis dan pertimbangan dalam melakukan perencanaan seperti menentukan prioritas perbaikan menuju arah yang lebih baik, serta mempertahankan yang sudah tercapai dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi.

Mengetahui persepsi mahasiswa terhadap kualitas layanan akademik yang dilihat, dialami dan dirasakan oleh mahasiswa harus terus dilakukan oleh institusi pendidikan. Dalam *Student Satisfaction Inventory* (SSI) terdapat dua belas dimensi atau atribut dalam mengukur kepuasan mahasiswa, yaitu:

1. *Academic advising effectiveness* (Efektifitas Bimbingan Akademik),

Adalah mengukur secara komprehensif program bimbingan dan konsultasi akademik. Konselor akademik/Pembimbing Akademik/Dosen Wali dievaluasi berdasarkan tingkat pengetahuan, kompetensi, kemudahan untuk ditemui dan kepedulian terhadap mahasiswa serta pendekatan terhadap mahasiswa. Bimbingan akademik mahasiswa dengan Konselor akademik/Pembimbing Akademik/Dosen Wali sangat penting untuk memberikan arahan-arahan, mengembangkan potensi mahasiswa dan motivasi dalam setiap kegiatan akademik mahasiswa.

Demikian pula dalam buku pedoman yang dikeluarkan oleh Depdikbud R.I. menyebutkan bahwa peran pembimbing akademik antara lain meliputi (1) mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada di Wilayah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya serta dalam memilih mata kuliah yang akan diambilnya. (2) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membicarakan masalah-

masalah yang dialami khususnya yang berkenaan dengan pendidikan, (3) membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.

Pada dasarnya dosen pembimbing akademik di perguruan tinggi berkedudukan sebagai unsur pendukung bimbingan program studi. Upaya bimbingan akademik dari dosen pembimbing akademik diarahkan sebagai upaya membantu agar mahasiswa dapat mengembangkan kemandiriannya dan kemampuannya, sehingga pada akhirnya mahasiswa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

2. *Campus Climate* (iklim akademik)

Yaitu mengevaluasi iklim yang kondusif dalam kampus seperti pengalaman menumbuhkan rasa bangga, rasa memiliki mahasiswa terhadap kampus, rasa bangga mahasiswa mempromosikan kampus mereka di masyarakat, keefektifan komunikasi dua arah antara lembaga dan mahasiswa.

Bangga dalam konteks ini bukanlah kesombongan, tetapi bangga yang mengarah pada perasaan ikut memiliki dan merasa bagian dari kelompok, atau yang oleh McMillan dalam teori *Sense of Community*-nya disebut sebagai *spirit* atau *membership*. Pengalaman yang baik yang dirasakan mahasiswa selama berada dalam institusi pendidikan akan menumbuhkan perasaan bangga dan memiliki.

3. *Campus life* (kehidupan kampus)

Yaitu mengukur tingkat efektivitas dari layanan institusi dalam mengisi kehidupan kampus, baik kegiatan mahasiswa yang bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler. Institusi harus dapat menciptakan suasana yang dibutuhkan mahasiswa dalam kampus, seperti adanya dukungan terhadap kegiatan yang menampung kreativitas mahasiswa seperti pentas seni, turnamen olahraga, ketersediaan unit-unit kegiatan yang mampu menampung minat dan bakat mahasiswa, kondisi peralatan dan perlengkapan laboratorium seperti mesin, komputer, software berfungsi dengan baik.

Dalam pendidikan kurikuler dan ekstrakurikuler memiliki muatan yang bersifat mengembangkan keilmuan dan potensi mahasiswa. Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dapat meningkatkan *soft skill* mahasiswa, Menurut O'Brien dalam bukunya *Making College Count*, *soft skill* dapat dikategorikan dalam tujuh area yang disebut *winning characteristics* yaitu

communication skill, organization skill, leadership, logic, effort, group skill, dan ethics. Kemampuan nonteknis yang tidak terlihat wujudnya namun sangat diperlukan yaitu *soft skill*¹².

4. *Campus support service* (layanan penunjang kampus),

Yaitu mengukur kualitas layanan akademik dan pendukung sehingga mahasiswa dapat merasakan pengalaman pendidikan lebih bermakna dan produktif. Layanan ini merupakan Kelengkapan buku/jurnal/literatur lainnya di perpustakaan yang menunjang perkuliahan, laboratorium komputer, ruang belajar yang digunakan di luar kelas, kemudahan akses komputer untuk keperluan mahasiswa (tugas, browsing, internet).

5. *Concern for the individual* (kepedulian terhadap individu mahasiswa),

Yaitu mengukur komitmen institusi dalam memperlakukan setiap mahasiswa secara individu yang harus dihargai. Bagian yang sering bertemu mahasiswa secara pribadi yaitu bagian akademik (tingkat di fakultas, jurusan/departemen), penasehat akademik/dosen wali, pembimbing dan lembaga pendukung mencakup dalam penilai ini.

6. *Campus safety and security* (keselamatan dan keamanan kampus),

Yaitu mengukur tanggung jawab kampus terhadap keamanan mahasiswa dari bahaya kecelakaan ataupun gangguan keamanan. Skala ini mengukur efektifitas fasilitas keamanan kampus dan personil keamanan.

7. *Service Excellence* (pelayanan terbaik),

Yaitu mengukur kualitas layanan secara umum terutama staf *front-line* (dosen pengajar dan karyawan administrasi) yang memberikan layanan pada mahasiswa. Skala ini juga mengukur kemampuan lembaga dalam menyediakan pelayanan yang unggul untuk kebersihan, kenyamanan, keindahan kampus, perawatan fasilitas, serta tingkah laku, dan sikap staff akademik kepada mahasiswa

8. *Student centeredness* (kegiatan mahasiswa)

Yaitu mengukur sikap institusi dalam memperlakukan mahasiswa agar merasa diterima dan dihargai, menyambut dengan baik kepentingan mahasiswa. Skala ini juga melihat kebijakan pihak institusi selalu mempertimbangkan kepentingan dan dampak bagi mahasiswa.

9. *Responsiveness to Diverse Population* (responsivitas terhadap beragam populasi)

¹² Ichsan S. Putra dan Ariyanti Pratiwi, *Sukses Dengan Soft Skill*, (Bandung: Direktorat Pendidikan ITB, 20015), hlm. 7

Yaitu mengukur komitmen institusi dalam memberikan kesempatan yang khusus kepada penyandang cacat, kepada calon siswa yang punya waktu terbatas, mereka yang telah berusia dan lain-lain agar dapat bisa mendaftar sebagai mahasiswa.

10. *Instructional effectiveness* (efektifitas perkuliahan)

Yaitu mengukur efektivitas perkuliahan mahasiswa, kurikulum dan komitmen kampus untuk mencapai tujuannya sebagai *academic excellence*. Skala ini mengukur efektifitas perkuliahan mahasiswa, proses belajar mengajar dan kurikulum, diantaranya mata kuliah yang ditawarkan lengkap, bervariasi dan berkualitas, kompetensi dan kesesuaian penugasan dosen dan asisten mata kuliah, adanya *feedback* berupa laporan hasil studi mahasiswa, efektifitas tugas dan praktikum.

11. *Recruitment and financial aid* (penerimaan mahasiswa baru dan beasiswa)

Yaitu mengukur efektivitas layanan yang berhubungan dengan rekrutmen mahasiswa baru (kelengkapan informasi, kompetensi panitia perekrutan, tahapan rekrutmen) dan mengevaluasi program bantuan biaya pendidikan (beasiswa).

12. *Registration effectiveness* (efektifitas registrasi)

Yaitu mengevaluasi proses registrasi dan pembayaran SPP. Skala ini juga mengukur komitmen institusi pendidikan dalam memberikan pelayanan secara efektif, kelancaran, kemudahan proses registrasi (pembayaran SPP, informasi registrasi).

Suatu hasil penelitian yang menunjukkan tingkat kepuasan yang rendah untuk suatu dimensi, belum tentu membuat dimensi tersebut menjadi prioritas perbaikan utama apabila dimensi tersebut ternyata memiliki tingkat kepentingan (*importance*) yang rendah. Bisa saja suatu dimensi dengan tingkat kepuasan yang tidak terlalu rendah lebih diprioritaskan apabila tingkat kepentingannya lebih tinggi¹³. Sehingga yang menjadi prioritas perbaikan institusi pendidikan selain mempertimbangkan tingkat kepuasan mahasiswa, juga tingkat kepentingan dari dimensi tersebut.

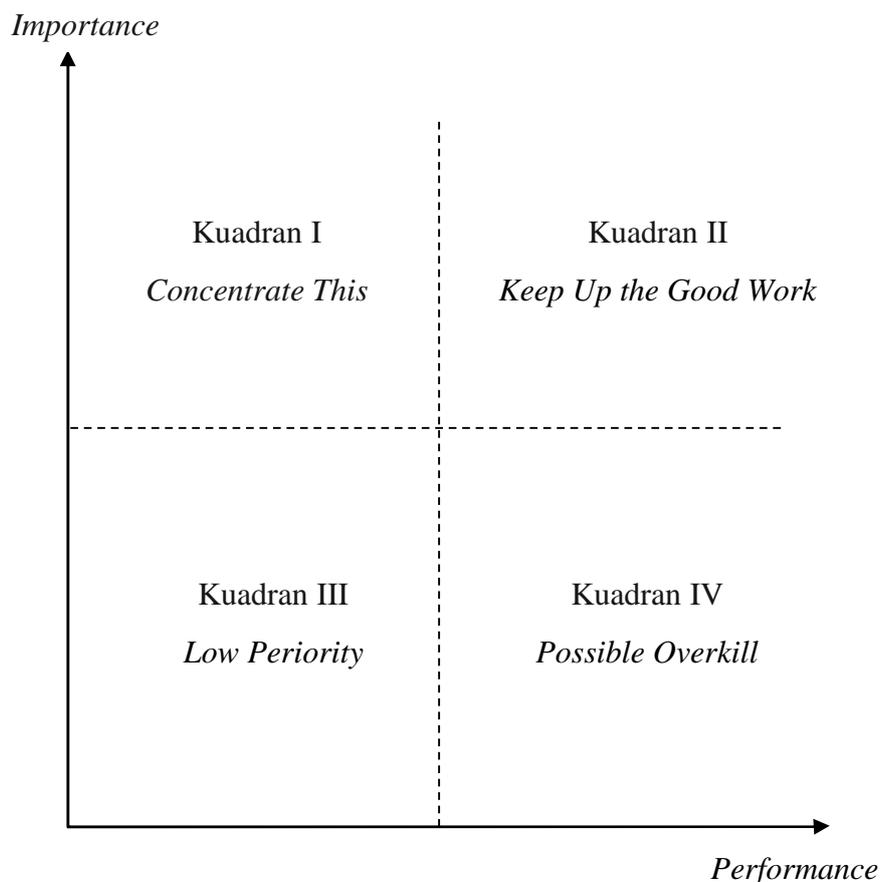
Adanya perbedaan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan maka akan menghasilkan *performance gap*. Selanjutnya dilakukan analisis strategi untuk prioritas perbaikan variabel-variabel pada setiap dimensi kualitas pelayanan dengan menggunakan *Importance Satisfaction Matrix*. Teknik *Importance Satisfaction Matrix* dikemukakan pertama kali oleh Martila & James tahun 1977 dalam teknik ini responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan berbagai

¹³ Adella Hotnida Siregar dan Lilik Zulaiha, "Pengukuran Kualitas Dengan Metode *Student Satisfaction Inventory* (SSI) di UPN Veteran Jakarta, Jurnal Bina Teknik, vol.6 No. 1, Desember 2010, hlm. 101-102

atribut relevan dan tingkat kinerja perusahaan (*perceived performance*) pada masing-masing atribut tersebut. Kemudian nilai rata-rata tingkat kepentingan atribut dan kinerja perusahaan akan dianalisis pada *Importance Performance Matrix*¹⁴.

Importance Performance Matrix memiliki 4 kuadran. Setiap kuadran menunjukkan kondisi kepentingan dan kepuasan mahasiswa dalam mendapatkan pelayanan akademik. dan strategi yang dapat dilakukan. Adapun *Importance Performance Matrix* sebagai berikut:

Gambar 1
Importance Performance Matrix



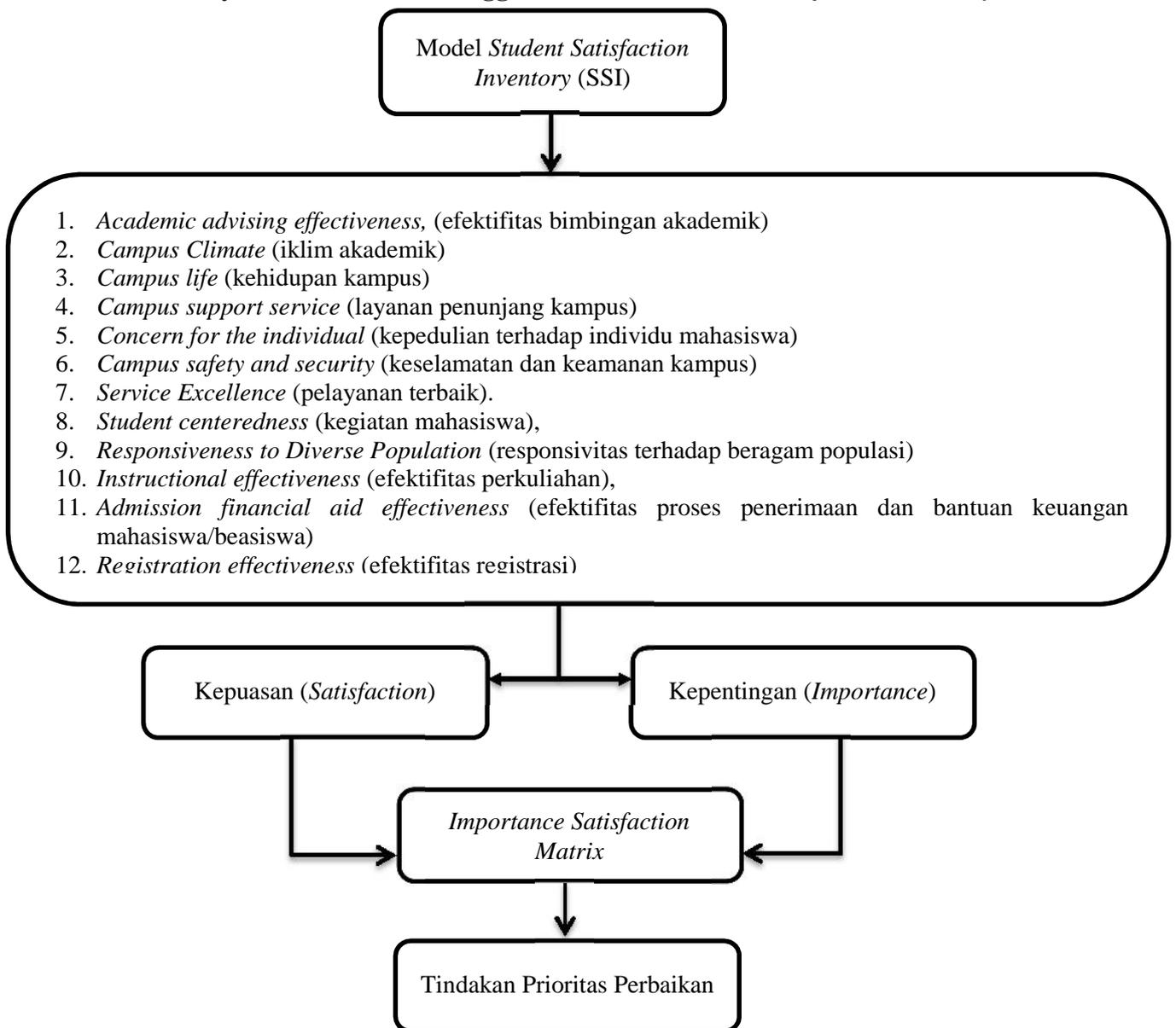
Arti dari setiap kuadran sebagai berikut:

1. Kuadran I (*concentrate this*) merupakan wilayah memuat atribut-atribut yang dianggap penting konsumen, namun kenyataannya atribut-atribut layanan tersebut belum sesuai dengan harapan konsumen (tingkat kepuasan rendah). Atribut dalam kuadran ini harus ditingkatkan kinerja layanannya dengan cara melakukan perbaikan terus-menerus.
2. Kuadran II (*Keep Up the Good Work*), merupakan wilayah yang memuat atribut-atribut mutu layanan yang dianggap penting oleh konsumen dan dianggap konsumen sudah sesuai

¹⁴ Naniek Utami Handayani, dkk, "Penilaian Kepuasan Konsumen Terhadap Program Studi Kesehatan Masyarakat Dengan Menggunakan Model Student Satisfaction Inventory", Seminar Nasional IENACO – 2019.

- dengan yang dirasakan sehingga tingkat kepuasan konsumen terhadap kinerja atribut mutu layanan relatif tinggi.
3. Kuadran III (*Low Periority*), adalah wilayah yang memuat atribut-atribut mutu layanan yang dianggap konsumen tidak istimewa (tingkat kepuasan konsumen terhadap mutu layanan atribut relatif rendah). Atribut-atribut mutu layanan yang masuk ke dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh konsumen kecil.
 4. Kuadran IV (*Possible Overkill*), adalah wilayah yang memuat atribut-atribut mutu layanan yang dianggap kurang penting oleh konsumen tetapi kinerja atribut-atribut mutu layanan tersebut dianggap konsumen istimewa. Kadang-kadang atribut-atribut mutu layanan yang masuk dalam kuadran ini dianggap memiliki tingkat layanan yang terlalu berlebihan.

Gambar 2
Kualitas Layanan Akademik Menggunakan Model *Student Satisfaction Inventory* (SSI)



Model *Student Satisfaction Inventory* (SSI) memudahkan dalam mengukur tingkat kualitas pelayanan akademik berdasarkan kepuasan (*satisfaction*) yang dirasakan mahasiswa dan tingkat kepentingan dari masing-masing dimensi *Student Satisfaction Inventory* (SSI) yang telah ditetapkan. Dengan membandingkan kepuasan mahasiswa dan kepentingan dari dimensi *Student Satisfaction Inventory* (SSI) maka dapat digambarkan dalam *Importance Performance Matrix* sehingga dapat melihat kepuasan mahasiswa atas kualitas layanan akademik yang telah diberikan dan bagaimana tingkat kepentingan dari atribut atau indikator kepuasan mahasiswa tersebut. Hal ini sangat memudahkan institusi akademik untuk mengambil tindakan atau kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan akademik yang efektif dan efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kualitas akademik harus dilihat dan diukur dari sudut pandang konsumen terutama sudut pandang dari mahasiswa bukan dari sudut pandang pimpinan, pejabat atau pegawai dari perguruan tinggi tersebut. Model *Student Satisfaction Inventory* (SSI) memudahkan dalam mengukur tingkat kualitas pelayanan akademik berdasarkan kepuasan (*satisfaction*) yang dirasakan mahasiswa dan tingkat kepentingan dari masing-masing dimensi *Student Satisfaction Inventory* (SSI) yang telah ditetapkan. Dengan membandingkan kepuasan mahasiswa dan kepentingan dari dimensi *Student Satisfaction Inventory* (SSI) maka dapat digambarkan dalam *Importance Performance Matrix* sehingga dapat melihat kepuasan mahasiswa atas kualitas layanan akademik yang telah diberikan dan bagaimana tingkat kepentingan dari atribut atau indikator kepuasan mahasiswa tersebut. Hal ini sangat memudahkan institusi akademik untuk mengambil tindakan atau kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan akademik yang efektif dan efisien.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, Sulekhul. 2017. *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Akademik Pada Sekolah Tinggi*. Jurnal Wahana Akademika, vol. 4 No. 2, Oktober 2017.
- Handayani, Naniek Utami, dkk. 2019. *Penilaian Kepuasan Konsumen Terhadap Program Studi Kesehatan Masyarakat Dengan Menggunakan Model Student Satisfaction Inventory*. Seminar Nasional IENACO.
- Ilyas. 2008. *Peran Ideal Dosen Pembimbing Akademik Dan Prestasi Belajar Mahasiswa Sebagai Sebuah Alternatif Solusi*. Educare Jurnal Pendidikan dan Budaya Vol. 6 No. 1.
- Istiqomah dan Arigiyati, 2016. *Pengukuran Kualitas Layanan Pendidikan Dengan Metode Student Satisfaction Inventory di Program Studi Pendidikan Matematika*. Jurnal Sosiohumaniora.
- Lupiyoadi, Rambat. 2013. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta : Salemba Empat

- Mahmud, Marzuki. 2012. *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Putra, Ichsan S. dan Ariyanti Pratiwi. 2015. *Sukses Dengan Soft Skill*. Bandung: Direktorat Pendidikan ITB.
- Qomaria, N. 2012. *Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Institut Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Mahasiswa Pada Universitas Muhammadiyah Di Jawa Timur*. Jurnal Aplikasi Manajemen.
- Ruslan, Rosady. 2012. *Manajemen Public Relation dan Media Komuniasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saifuddin dan Sunarsih. 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Jurnal Az Zarqa, vol. 8 No. 2 Desember 2016
- Septione, Anggana Putra, dkk. 2018. *Kualitas Layanan Akademik Mahasiswa Di Program Studi Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan Universitas Negeri Jakarta*. Jurnal Pendidikan Teknik Sipil, vol.7 No. 2, Agustus 2018.
- Siregar, Adella Hotnida dan Lilik Zulaiha. 2010. *Pengukuran Kualitas Dengan Metode Student Satisfaction Inventory (SSI) di UPN Veteran Jakarta*. Jurnal Bina Teknika, vol.6 No. 1.
- Tuerah, F.F.R, L.Maneke, H.N.Tawas. 2015. *Analisis Kualitas Layanan Akademik Dan Administrasi Terhadap Kepuasan Mahasiswa*. Jurnal EMBA, Vol. 3 No.4.
- Yamit, Zulian. 2011. *Manajemen Kualitas: Produk dan Jasa*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia
- Zuroidah, Nunik. 2015. *Implementasi Importance Performance Analysis (IPA) Untuk Mengidentifikasi Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Akademik*. Jurnal Vol 26 No. 2.